

**POLITISASI IDENTITAS PADA KAMPANYE PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019**

**(Tesis)**

Oleh

**BENY ISWANTO**

**1826021011**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

**POLITISASI IDENTITAS PADA KAMPANYE PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019**

**Oleh:**

**BENY ISWANTO**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **POLITISASI IDENTITAS PADA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019**

**Oleh**

**BENY ISWANTO**

Telah terjadi politisasi identitas pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politisasi identitas yang dilakukan para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, penentuan informan yakni calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pringsewu, pemilih, tokoh masyarakat, akademisi. Analisis yang digunakan yaitu pendekatan instrumentalisme dari Pierre Van De Bergh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politisasi identitas terjadi dalam 3 bentuk: (1) politisasi etnis dilakukan para calon untuk merebut pemilih mayoritas Jawa dengan menggunakan simbol dan bahasa Jawa dialat peraga kampanyenya baik calon yang beretnis Jawa dan Non-Jawa, (2) politisasi agama dilakukan dengan menggunakan simbol keagamaan, pendekatan dengan tokoh agama, lebih sering datang ke acara-acara pengajian, pakaian yang lebih Islami. Politisasi tersebut dilakukan oleh para calon baik yang beragama Islam maupun Non-Islam, (3) politisasi wilayah dilakukan para calon untuk mengamankan suara di daerah calon tinggal dengan menggunakan isu putra daerah, *wonge dewe* kemasyarakat sekitar dan mencegah calon lain masuk ke wilayah pemilihanya. Politisasi etnis, agama, dan wilayah digunakan sebagai alat untuk memobilisasi massa untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan para calon. Strategi dengan menggunakan politisasi identitas yang dilakukan para calon tersebut ada yang berhasil dan ada juga gagal.

**Kata Kunci:** Politisasi identitas, Pemilihan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## **ABSTRACT**

### **IDENTITY POLITIZATION IN THE ELECTION CAMPAIGN OF THE REGIONAL PEOPLE'S REGIONAL BOARD OF REPRESENTATIVES IN PRINGSEWU REGENCY IN 2019**

By

**BENY ISWANTO**

There has been a politicization of identity in the election of members of the Pringsewu Regency Regional People's Representative Council (DPRD). Collecting data using interview and documentation methods, determining informants namely candidates for members of the Pringsewu Regency DPRD, the Regional General Election Commission (KPU) of Pringsewu Regency, voters, community leaders, academics. The analysis used is the instrumentalism approach of Pierre Van De Bergh. The results of the study show that identity politicization occurs in 3 forms: (1) ethnic politicization is carried out by candidates to win the majority of Javanese voters by using symbols and Javanese language in their campaign props for both Javanese and non-Javanese ethnic candidates, (2) religious politicization is carried out by use religious symbols, approach religious leaders, attend recitation events more often, dress more Islamically. The politicization is carried out by candidates both Muslim and non-Muslim, (3) the politicization of territory is carried out by candidates to secure votes in the area where the candidate lives by using the issue of the son of the region, wonge dewe to the surrounding community and preventing other candidates from entering their electoral area. The politicization of ethnicity, religion, and territory is used as a tool to mobilize the masses to seize and maintain the power of the candidates. Some of the strategies using identity politicization carried out by these candidates have been successful and some have failed.

**Keywords:** Identity politicization, Election, Regional House of Representatives

Judul Tesis : **POLITASASI IDENTITAS PADA  
KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019**

Nama Mahasiswa : **BENY ISWANTO**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1826021011**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Dr. Ari Darmastuti, M.A**  
NIP.1960041619986032002

  
**Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A**  
NIP. 197804302005011002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

  
**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D**  
NIP.196010101986031006

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A**

Sekretaris : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A**

Anggota : **Dr. Tabah Maryanah, M.Si**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
NIP. 196108071987032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T**  
NIP. 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 19 November 2021



## PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.



dar Lampung, .....2021  
g membuat Pernyataan

*Beny Iswanto*  
BENY ISWANTO  
NPM. 1826021011

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sukoharjo II pada tanggal 06 Maret 1995, Yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Pasangan bapak Sartono dan Ibu Rohmatun dengan dua adik Bernama Azhari Anhar dan Eliza Sari. Penulis juga telah Berkeluarga dengan istri bernama Ani Yusnita dan dikaruniai Seorang putri yang bernama Hamnah Urwa Nusaibah. Penulis menumpuh pendidikan formalnya di SDN 02 Sukoharjo II tahun 2001-2007, SMP N 01 Sukoharjo tahun 2007-2010, SMA 01 Muhammadiyah Pringsewu tahun 2010-2013.

Kemudian penulis melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2013-2017 dengan mengambil jurusan Pemikiran Politik Islam di Fakultas Ushuludin dan melanjutkan program pascasarjana di Universitas Lampung tahun 2018-2021 dengan Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan dengan konsen (Politik Lokal dan Otonomi Daerah) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



## **PERSEMBAHAN**

1. Keluargaku : Istri dan anakku, bapak dan ibu serta kedua adik-adikku
2. Almamaterku: Universitas Lampung

## **MOTTO**

“Jangan terlalu dikejar, jika memang jalanya pasti Allah akan memperlancar. Karena apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalanya untuk menemukanmu”. ( Ali bin Abi Thalib)

“Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya, kamu pasti berhasil”. (Utsman bin Affan)

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunianya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Politisasi Identitas Pada Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukannya dalam proses penyusunan tesis ini;
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A, selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukannya dalam proses penyusunan tesis ini;
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah, MA., selaku Dosen Pembahas atas kesediaannya memberikan bimbingan dan masukan-masukannya;
8. Kepada semua narasumber anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tahun 2019, para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu 2019, Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, Bapak Dr, Nadirsah Hawari, Lc, M.A, Tokoh masyarakat, pemilih yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini;
9. Seluruh dosen pengajar dan akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung khususnya Program Studi Magister Ilmu

Pemerintahan;

10. Keluargaku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi;
11. Bapak Kepala Pekon Sukoharjo II dan semua perangkat pekon yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk bisa menyelesaikan tesis ini;
12. Teman-teman MIP 2018 yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta teman diskusi dalam tesis ini, yang terkhusus teman-teman OTDA (Adi, Tedi, Ponco, Rofiq, Mas Isnaini, Isnaini dan Ovi);
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;

Bandar Lampung, ..... 2021

**BENY ISWANTO**

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 2          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....  | 13         |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....   | 13         |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....  | 13         |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>15</b>  |
| 2.1 Pengertian Identitas .....   | 15         |
| 2.2 Politik Identitas.....   | 18         |
| 2.3 Politisasi Identitas.....  | 23         |
| 2.4 Politisasi Identitas Etnis pada Kampanye Anggota<br>DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 .....            | 25         |
| 2.5 Kerangka Pikir.....  | 33         |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>34</b>  |
| 3.1 Tipe Penelitian.....   | 34         |
| 3.2 Alasan Pemilihan Fokus.....  | 34         |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....  | 36         |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....   | 37         |
| 3.5 Penentuan Informan .....   | 39         |
| 3.6 Teknik Pengolahan Data .....   | 41         |
| 3.7 Teknik Analisis Data.....  | 41         |
| 3.8 Keabsahan Data.....  | 43         |
| <b>IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>  | <b>44</b>  |
| 4.1 Gambaran Umum Perolehan Kursi Partai Politik Anggota<br>DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2009-2019.....    | 44         |
| 4.2 Pelaksanaan Pemilihan Anggota DPRD<br>di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 .....                            | 46         |
| <b>V. POLITISASI IDENTITAS PADA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA<br/>DPRD KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 .....</b> | <b>57</b>  |
| 5.1 Politisasi Etnis .....   | 58         |
| 5.2 Politisasi Agama.....  | 75         |
| 5.3 Politisasi Wilayah.....  | 87         |
| 5.4 Implikasi Politisasi Identitas Terhadap Demokrasi .....  | 93         |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>VI. SIMPULAN DN SARAN .....</b> | <b>102</b> |
| 6.1 Simpulan.....                  | 102        |
| 6.2 Saran .....                    | 104        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>        | <b>106</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>               | <b>110</b> |

**DAFTAR TABEL**

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| Tabel 1.  | Pola Politik Identitas .....                              | 22  |
| Tabel 2.  | Daftar Nama Informan .....                                | 40  |
| Tabel 3.  | Jumlah perolehan kursi DPRD Kabupaten Pringsewu .....     | 45  |
| Tabel 4.  | Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pringsewu 2019.....        | 47  |
| Tabel 5.  | Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Pringsewu 2019 .....         | 48  |
| Tabel 6.  | Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Pringsewu. 2019.....    | 49  |
| Tabel 7.  | Calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 1.....           | 50  |
| Tabel 8.  | Calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 2.....           | 50  |
| Tabel 9.  | Calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 3.....           | 51  |
| Tabel 10. | Calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 4.....           | 51  |
| Tabel 11. | Calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 5.....           | 52  |
| Tabel 12. | Domisili calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 1 ..... | 54  |
| Tabel 13. | Domisili calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 2 ..... | 54  |
| Tabel 14. | Domisili calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 3 ..... | 55  |
| Tabel 15. | Domisili calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 4 ..... | 55  |
| Tabel 16. | Domisili calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 5 ..... | 56  |
| Tabel 17. | Politisasi Etnis.....                                     | 74  |
| Tabel 18. | Politisasi Agama .....                                    | 87  |
| Tabel 19. | Politisasi Wilayah .....                                  | 93  |
| Tabel 20. | Impilikasi Politisasi Identitas .....                     | 101 |

## DAFTAR GAMBAR

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Gambar 1. | Kampanye Calon Wakil Gubernur Lampung .....           | 8  |
| Gambar 2. | Kampanye Calon Bupati Pringsewu .....                 | 9  |
| Gambar 3. | Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu ..... | 10 |
| Gambar 4. | Kerangka Pikir .....                                  | 33 |
| Gambar 5. | Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu ..... | 64 |
| Gambar 6. | Kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu ..... | 65 |



## DAFTAR SINGKATAN

|          |   |
|----------|---|
| APK      | : Alat Peraga Kampanye                  |
| Bawaslu  | : Badan Pengawas Pemilu                 |
| BT       | : Bintang Timur                         |
| Dapil    | : Daerah Pemilihan                      |
| DCT      | : Daftar Calon Tetap                    |
| DPT      | : Daftar Pemilih Tetap                  |
| DPTb     | : Daftar Pemilih Tetap Tambahan         |
| DPD      | : Dewan Perwakilan Daerah               |
| DPR      | : Dewan Perwakilan Rakyat               |
| DPRD     | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah        |
| Gerindra | : Partai Gerakan Indonesia Raya         |
| Golkar   | : Partai Golongan Karya                 |
| Hanura   | : Partai Hati Nurani Rakyat             |
| KPU      | : Komisi Pemilihan Umum                 |
| LS       | : Lintang Selatan                       |
| LSM      | : Lembaga Swadaya Masyarakat            |
| Nasdem   | : Partai Nasional Demokrat              |
| PAN      | : Partai Amanat Nasional                |
| PBB      | : Partai Bulan Bintang                  |
| PDIP     | : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Pemilu   | : Pemilihan Umum                        |
| Perindo  | : Partai Persatuan Indonesia            |

|         |   |
|---------|---|
| Pilkada | : Pemilihan Kepala Daerah                 |
| PKB     | : Partai Kebangkitan Bangsa               |
| PKNU    | : Partai Kebangkitan Nasional Ulama       |
| PKPB    | : Partai Karya Peduli Bangsa              |
| PKPI    | : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
| PKPU    | : Peraturan Komisi Pemilihan Umum         |
| PKS     | : Partai Keadilan Sejahtera               |
| PPP     | : Partai Persatuan Pembangunan            |
| PSI     | : Partai Solidaritas Indonesia            |
| UU      | : Undang-undang                           |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat niscaya bagi negara demokrasi. Sebagai sistem, demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi yang populis, adil dan beradab, kendati bukan tanpa kelemahan. Begitu tak terbantahkannya tesis-tesis demokrasi sehingga hampir semua penguasa otoriter dan tiran menyebut sistem demokratis. Politik identitas dalam sebuah negara demokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Kemunculannya merupakan salah satu konsekuensi logis dari diterapkannya paham demokrasi dalam sebuah negara, dimana salah satu asas demokrasi yang paling penting adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang dijunjung tinggi oleh negara. Hak-hak dasar tersebut diantaranya adalah *freedom of expression* yang menjamin setiap individu untuk menentukan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat disekitarnya. *Freedom of expression* ini yang menjadi dasar bagi beberapa individu yang merasa memiliki kesamaan baik secara pemikiran, ideologi, dan identifikasi tertentu untuk sepakat membentuk sebuah identitas dengan tujuan mengartikulasikan kepentingan yang didasarkan pada identitas tersebut (Rendy Adiwilaga Dkk, 2018:273).

Politik identitas ini, terbentuk sebagai wujud dari interaksi yang terjadi antara nilai-nilai demokrasi yang menjadi *mainstream* dengan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai lain yang sudah terbentuk sebagai sebuah struktur sosial di masyarakat. Persinggungan diantara nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai lokal yang sudah ada di masyarakat, serta ditambah kesadaran masyarakat sebagai sebuah entitas dalam demokrasi yang perlu dijunjung tinggi hak-hak dasarnya, membuat politik identitas, namun kemunculan politik identitas ini banyak mendapat sorotan dan pandangan dari banyak ilmuwan sosial. Hal ini dikarenakan, munculnya kekhawatiran dari para ilmuwan sosial bahwa politik identitas akan menjadi

sebuah tantangan dan hambatan bagi demokrasi karena dianggap dapat membuat masyarakat menjadi terpecah belah dan terpolarisasi berdasarkan identifikasi identitasnya masing-masing, sehingga dapat secara langsung mengancam nasionalisme dan pluralisme sebuah negara. Namun demikian, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa politik identitas ini tidak akan mengancam nasionalisme dan pluralisme sebuah negara, jika para ilmuwan politik mencarikannya sebuah konsep agar menjadi cara sehingga politik identitas tidak menjadi sandungan bagi demokrasi itu sendiri. Politik identitas justru mengurangi pemaknaan demokrasi sebab bisa menimbulkan konflik antar etnik, suku agama, maupun antar Ras. Sistem demokrasi akan kuat jika pemilih dan para calon lebih menekankan visi misi calon dan program kerja ketimbang menonjolkan identitasnya sebagai bagian dari suara mayoritas dari pemilih (Rendy Adiwilaga Dkk, 2018: 274).

Secara implikasi politik identitas telah dibingkai terutama dalam kaitannya dengan dua argumen normatif tertentu yang dikemukakan oleh sekelompok filsuf politik Inggris-Amerika, beberapa pemikir liberal utama dalam dua dekade terakhir telah mempertanyakan apakah liberal demokrasi sesuai dengan klaim dan tindakan yang berakar pada wacana identitas kelompok yang unik. Beberapa melangkah lebih jauh lagi, melihat dalam kebangkitan politik identitas, dan mempopulerkan intelektualnya, ancaman utama bagi masyarakat demokratis, argumen kedua yang terkait adalah bahwa suatu bentuk politik yang mendorong individu untuk melihat diri mereka memiliki ikatan dan komitmen untuk mencakup kelompok adalah tidak mungkin membiarkan mereka menjadi, atau dengan alasan, warga negara (Michael Kanny, 2004:1).

Kecenderungan akan berkembangnya politik identitas sama sekali tidak berkait dengan sistem politik tertentu. Politik identitas bahkan dapat berkembang subur dalam sistem demokrasi sekalipun. Di Indonesia, kecenderungan itu terlihat lebih jelas justru ketika terdapat ruang untuk mengekspresikan kebebasan. Praktik politik identitas di negeri ini dapat dikenali melalui berbagai bentuk, dari yang samar-samar hingga agak jelas. Sebagian orang berpendapat bahwa pembentukan partai nasional yang berbasis agama dan daerah administratif setingkat provinsi dan kabupaten atas dasar ikatan etnis di beberapa wilayah di luar Jawa merupakan

indikasi akan terjadinya kecenderungan itu. Sedangkan dalam pemerintahan rezim Orde Baru identitas primordial adalah isu yang dibungkus rapi dalam sebuah kategori bernama politik identitas. Kategori tersebut dikontrol oleh aparat negara agar tidak mengancam otoritas kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Rezim Orde Baru tumbang, selanjutnya membuka pintu bagi kelompok identitas, untuk memulai gerakan yang lebih leluasa (Shofan, 2018: 3).

Pembentukan daerah-daerah administratif di beberapa wilayah otonomi baru memperlihatkan terjadinya teritorialisasi identitas merupakan sebuah konsep yang dipakai untuk merujuk berkembangnya fenomena politisasi identitas etnik (kadang bercampur dengan agama, etnik atau yang lainnya) untuk tujuan pembentukan daerah pemerintahan baru. Teritorialisasi identitas sering merupakan awal dari *re-grouping* kultural atas dasar wilayah yang dalam praktiknya dapat mengambil wajah terbentuknya daerah otonom, bahkan negara baru. Dalam kasus yang terakhir, terbentuknya Pakistan dari India dan Bangladesh dari Pakistan adalah contoh-contoh yang cukup jelas untuk menggambarkan teritorialisasi identitas yang berakhir dengan pemisahan diri secara politik dari kelompok dominan.

Di Indonesia sendiri, isu-isu mengenai politik identitas sudah banyak bermunculan. Etnisitas merupakan basis yang sering mendasari munculnya politik identitas di Indonesia. Hal ini tentunya bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya yang memiliki nilai, pandangan, identifikasi, dan kearifannya masing-masing. politik identitas berbasis etnisitas menjadi sangat penting, untuk menghindari ekspresi politik identitas yang berlebihan yang dapat mengancam integritas bangsa Indonesia. Politik identitas merujuk pada praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok atas dasar etnis, agama, atau denominasi sosial-kultural lainnya yang merupakan kontras terhadap praktik politik yang berbasiskan kepentingan (*interest*). Walaupun sesungguhnya ini bukan merupakan fenomena yang sepenuhnya baru, politik identitas merupakan sebuah tema yang menarik perhatian para ahli ilmu sosial, terutama setelah terjadinya konflik yang

melibatkan kekerasan diantara berbagai kelompok etnis yang berbeda. Akan tetapi, politisasi identitas juga berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri apabila menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik. Politisasi (*politicization*) merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan (Adediji 2016: 115).

Bergulirnya demokrasi di Indonesia yang mengisyaratkan hak bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dipilih dan memilih, sering diperhadapkan pada kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia, mulai dari suku, budaya agama, isu etnisitas ini menjadi senjata yang ampuh digunakan oleh elit dalam memperoleh tujuan kekuasaan yang diinginkan, terutama pada proses pemilihan umum. Apalagi berbicara tentang etnis pada suatu daerah. Pengalaman yang empirik menunjukkan, bahwa sejak penyelenggaraan pemilihan umum secara berlangsung pada tahun 2004, para elit yang berangkat dari suku, budaya, atau agama yang mayoritas tidak sedikit yang menjadi pemenang pada prosesi tersebut, kemudian hasil dari proses tersebut, bisa kita lihat bahwa pelaksanaan pemilihan umum terutama di legislatif belum mampu melahirkan atau sangat jarang kita temukan orang-orang yang memiliki integritas dan ikhlas memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya (Qodir, 2010: 615).

Pemilu 2004 diselenggarakan untuk menjadi ajang bagi rakyat Indonesia bersama-sama menjadi pelaku pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakilnya di legislatif dan eksekutif. Pemilu 2004 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dimana rakyat hanya memilih anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD dengan cara memilih tanda gambar partai politik peserta pemilu. Sistem Pemilu 2004 mengalami perubahan, yaitu pemilu legislatif DPR dan DPRD memilih bukan hanya memilih para wakil rakyat melalui tanda gambar partai politik peserta pemilu, namun juga memilih nama orang calon legislatif yang diajukan parpol (Paskarina, 2008:3).

Pemilu tahun 2009 mulai diberlakukannya sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka sampai dengan pemilu 2019, bagi peserta pemilu terutama calon anggota legislatif mereka harus berkompetisi selain dengan calon anggota legislatif dari partai lain, mereka juga bersaing dengan caleg dari partainya sendiri untuk mendapatkan suara terbanyak. Perbedaan tersebut diharapkan dapat membangkitkan gairah partisipasi politik masyarakat dan disisi lain turut membantu memulihkan kepercayaan publik pada pemerintah yang terbentuk. Negara yang menerapkan prinsip demokrasi, pemilu merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Ideal pemilu bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintah secara teratur dan sesuai sesuai mekanisme yang dijamin konstitusi (Paskarina, 2008:4). Sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang dilakukan sejak 2009 sampai sekarang ini justru menjadi celah bagi calon anggota legislatif maupun eksekutif dalam menawarkan program kerjanya kepada masyarakat sehingga memberikan pengaruhnya kepada masyarakat. Prinsip demokrasi yang mensyaratkan pengakuan akan keberagaman justru belum sepenuhnya terwujud. Praktik demokrasi di Indonesia justru banyak diwarnai dengan bangkitnya politik identitas, bahkan seiring menguatnya otonomi daerah, etnosentrisme juga juga mewarnai relasi kekuasaan di daerah. Hasil dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah munculnya fenomena politik identitas. Entitas yang ada di Indonesia berusaha untuk mengekspresikan preferensi politik, yang didasarkan pada identitas yang melekat pada dirinya, baik itu identitas agama, identitas etnis, dan sebagainya.

Politik identitas awalnya muncul ketika kemajuan yang dicapai ternyata tidak disertai kebersamaan. Pola sentralisme yang diterapkan sebagai konsekuensi model pembangunan ekonomi ternyata menimbulkan kesenjangan antar daerah. Mulai muncul ketidakpuasan daerah akan perlakuan negara. Ketidakpuasan daerah akan perlakuan negara, ketidakpuasan akan redistribusi sumber daya alam personil, dan keuangan menjadi latar belakang menguatnya sentiment primordial. Pada akhirnya identitas etnis digunakan sebagai instrument politik untuk menekan Negara. Politik identitas inilah yang kemudian mengemuka dalam bentuk

tuntutan-tuntutan separatis ataupun disintegrasi negara. Kasus Aceh, Papua dan Riau menjadi contoh isu etnisitas sebagai *bargaining power* untuk menekan negara agar lebih memperhatikan daerah (Paskarina, 2008:84).

Politik desentralisasi melalui otonomi daerah pasca Orde Baru membawa implikasi pergeseran fokus politik kedaerah-daerahan dengan semakin menguatnya politik identitas yang dapat menimbulkan konflik baru di daerah berupa diskriminasi terhadap kelompok primordial yang jumlahnya sedikit atau dapat menimbulkan semangat daerah yang berlebihan. Isu Putra Daerah, etnis, agama dan lain sebagainya juga semakin menguat sejak diberlakukannya politik desentralisasi baik dalam pemilihan kepala daerah maupun legislatif dan eksekutif menjadi semakin kuat dalam pemilu dan pilkada (Paskarina, 2008:86).

Politik identitas betul-betul dipilah, sehingga terlihat perbedaan yang jelas tentang apa itu politik identitas (*political of Identity*) dan apa itu identitas politik (*political identity*). Identitas politik (*Political identity*) merupakan sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek, di dalam ikatan suatu komunitas politik. Adapun politik Identitas (*political of identity*) akan mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu dalam identitas politik maupun identitas sosial yang menjadi sumber dan sarana politik (Setyaningrum, 2005:15).

Kepentingan subjek tersebut dilakukan dengan menggunakan politisasi identitas untuk dapat menarik perhatian pemilih agar memberikan suaranya kepada seorang kandidat melalui kampanye politik. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Kampanye diartikan sebagai suatu kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu. Sedangkan kampanye menurut Kotler dan Roberto dalam (Cangra, 2011:274) adalah sebuah upaya yang diorganisasi oleh satu kelompok yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.



Kampanye sebagai rangkaian kegiatan pemilihan umum hanya bersifat politik yang dilakukan oleh kandidat, tim kampanye dan partai politik. Kampanye yang bersifat politik dikenal juga dengan sebutan *candidate-oriented campaigns* yaitu kegiatan kampanye yang berorientasi pada calon untuk kepentingan kampanye politik. Misalkan dalam pemilihan umum, pilkada dan lain sebagainya (Arifin, 2014:99).

Kegiatan kampanye yang kandidat/calon sebarakan seringkali mengandung unsur politisasi identitas dengan menggunakan identitas etnis, bahasa, agama, wilayah, yang kerap kali menjadi penduduk mayoritas yang menempati daerah tersebut guna memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dan mempengaruhi pemilih. Pemilu di Indonesia tak jarang ditemukannya unsur politisasi identitas dalam kampanye baik dipemilu maupun dipilkada, dampak dari unsur politisasi identitas tentu saja dapat mengancam kelangsungan demokrasi di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai, keadilan, persatuan dan kesatuan (Edytya & Novanda, 2018:568).

Politik pemilu pasca 2014 ditandai dengan menguatnya politisasi identitas. Isu-isu yang berkaitan dengan etnis, agama, atau ideologi tertentu digunakan oleh sebagian elite politisi untuk membangun citra negatif lawan-lawan politiknya (Mietzner, 2014). Maraknya diskursus yang mengaitkan isu agama dan politik pemilu pasca Pilpres 2014 serta gelombang unjuk rasa yang menyertai Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 merupakan indikasi menguatnya politisasi identitas menuju pemilu 2019 (Herdiansah, Junaidi, & Ismiati, 2017). Sejak pilkada DKI Jakarta, dengan menggunakan politisasi agama di dalamnya. Saat itu penggunaan politisasi identitas kembali digunakan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara mayoritas yang tergabung dalam suatu kelompok, baik etnis, agama, maupun wilayah. Terbukti penggunaan politisasi agama dapat mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama yang beragama non muslim yang dikalahkan Anies Rasyid Baswedan dengan memobilisasi suara muslim di DKI Jakarta (Sari, 2016:153). Sementara dalam pemilihan presiden politisasi etnis yang sering diungkapkan yaitu “Presiden haruslah orang Jawa” “sudah saatnya kepemimpinan sunda muncul menjadi presiden” menjadi contoh ekspresi politik

identitas berbasis etnis namun masih dalam kapasitas etnisnya sebagai bagian dari integritas bangsa (Rendy Adiwilaga, Dkk, 2018:275).

Politisasi identitas juga terjadi di Lampung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018. Berdasarkan prapenelitian peneliti pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim menggunakan bahasa daerah khususnya Jawa untuk menarik simpati pemilih, seperti jargon-jargon “*pilih seng ayu dewe*”, *bolone mbak nunik* dan lain sebagainya. Seperti yang tergambar di bawah ini:

Gambar.1



Pada pemilihan Bupati dan wakil bupati politisasi identitas juga digunakan oleh para kandidat/calon dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai pesan kampanyenya untuk dapat memberikan kesan kepada pemilih mayoritas Jawa. Seperti tergambar dalam stiker dibawah ini.

Gambar. 2



Di Kabupaten Pringsewu juga mengemuka politisasi identitas pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang biasa disebut dengan (DPRD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 dengan menggunakan jargon-jargon kampanyenya dengan menggunakan bahasa Jawa, karena mayoritas penduduk di Kabupaten Pringsewu adalah bersuku Jawa. Setiap kandidat berlomba-lomba untuk dapat menarik simpati dari pemilih dengan menggunakan bahasa Jawa, tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat untuk mengenalnya, selain itu juga terdapat politisasi agama dan politisasi wilayah.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan menemukan adanya indikasi politisasi identitas yang dilakukan oleh para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 dengan menggunakan politisasi etnis, agama dan wilayah dalam kampanye politiknya. Penggunaan bahasa dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa yang peneliti lakukan saat turun kelapangan. Kata-kata berbahasa Jawa yang peneliti temui seperti “*yen ijek dipercoyo lanjutno*”, “*pilih seng peci ijo*”, “*piye-piye wonge dewe*”, “*ajak kelalen yo lur*”, *Wong Ndeso*. Penggunaan sentiment berlatarkan etnis dan bahasa marak peneliti temukan khususnya di Dapil 2 yaitu di Kecamatan Sukoharjo dan Adiluwih. Seperti Kaos yang di buat

oleh calon Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Maulana M Lahuddin dari PKB  
:

Gambar.3



Politisasi identitas dengan mengedapankan penggunaan bahasa Jawa bukan hanya dilakukan oleh calon yang memang orang keturunan Jawa asli, penggunaan bahasa Jawa juga dipakai oleh calon dari non Jawa namun dalam kampanye politiknya menggunakan bahasa Jawa. Hasilnya dalam pemilihan beragam ada yang jadi dan ada juga yang gagal.

Etnis menjadi isu yang hangat dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu 2019 karena ada keyakinan dibenak para kandidat atau tim suksesnya bahwa cara termudah dan paling efektif menarik hati orang untuk memilih seorang kandidat adalah dengan cara membangkitkan ikatan emosional pemilih pada calon. Ikatan emosional mana yang bisa melebihi kecintaan seseorang pada identitas primordialnya seperti suku, agama, ras dan golongan atau komunitas diantara semua identitas ini, etnis agama dan ras menjadi identitas yang paling kuat sehingga mudah menyulut emosi dan dapat dimobilisasi, dari sini dapat dilihat bahwa politik identitas mengalami transformasi pemaknaan identitas karena proses identitas dibuat untuk kepentingan orang-orang yang membuatnya, bukan untuk kepentingan identitas sendiri. Segala elemen-elemen etnisitas dapat menjadi kekuatan untuk memperoleh legitimasi dan menghegemoni masyarakat elemen etnis bukan lagi sesuatu yang tidak penting dan tertinggal tetapi justru

menjadi kekuatan yang ampuh dalam pemilihan khususnya pemilihan kepala daerah (Sari, 2016:153).

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji politisasi identitas pada kampanye pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019, namun sebelum penelitian ini dibuat juga telah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang politik identitas maupun politisasi identitas baik dalam Pemilu, Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi di setiap daerah di Indonesia yaitu sebagai berikut;

Politik identitas telah diteliti memiliki dampak yang signifikan terhadap perolehan suara dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang bersentimen agama dan budaya. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Hurriyah, 2019), hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu politik identitas di Sumbar memiliki dampak terhadap elektoral terhadap suara Prabowo dan Sandiaga Uno dengan penggunaan sentiment agama dan budaya. Sementara politik identitas di Sulut tidak berdampak, karena lebih melihat kepada aspek kinerja dari Jokowi.

Politik identitas juga memiliki pengaruh terhadap perilaku dalam menentukan pilihannya terhadap Pemilihan Gubernur NTT seperti Penelitian yang dilakukan oleh (Negong, 2017). Dengan menggunakan metode kuantitatif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas berbasis agama dan politik identitas berbasis etnis berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku pemilih.

Politik identitas kembali menguat dengan adanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dengan menggunakan sentiment agama dalam pemilihan tersebut seperti dalam penelitian (Sari, 2016) dengan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkitan politik identitas Islam terjadi melalui upaya pembangunan citra diri dan menegakkan harga diri sebagai Muslim yang terhina sehingga sesama Muslim harus memilih mereka yang seagama dan seiman.

Penelitian tentang politik identitas dalam pemilihan Bupati/walikota yang diteliti oleh (Sagala & Sarumpaet, 2018). Penelitian ini melihat aspek keterlibatan etnik tertentu dalam pemilihan bupati/walikota Binjai memiliki dampak yang positif terhadap perolehan calon tertentu yang memiliki keterlibatan etnik dalam kampanyenya. Dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif diperoleh hasil bahwa keterlibatan etnis memiliki pengaruh dalam hal untuk menjadi sumber suara.

Hubungan identitas etnis menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan pemilih seperti yang diteliti oleh (Rendy Adiwilaga Dkk, 2018) dengan pendekatan kualitatif. Dalam kajian ini menelaah konsep-konsep politik identitas yang kemudian dielaborasi dengan fakta-fakta kontemporer, sehingga sampai kepada pemikiran yang argumentatif yang terkait dengan politik identitas di demokrasi Indonesia.

Di Lampung politik identitas dilakukan dengan mengedepankan simbol-simbol etnis seperti penelitian yang dilakukan (Riastuti, 2009), dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah di Lampung selalu menggunakan simbol etnik atau persilangan etnik diantara calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sementara di Kabupaten Pringsewu telah dilihat sikap politik masyarakat Kabupaten Pringsewu terhadap kandidat Bupati atau wakil Bupati yang merupakan persilangan di antara dua etnik yaitu Lampung dan Jawa seperti penelitian yang dilakukan (Rahmaini, 2017) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat/tokoh etnis Jawa di Pringsewu terhadap pluralitas calon kepala daerah dan wakilnya cenderung sudah baik. Karena telah dua kali pilkada di Kabupaten Pringsewu hampir semua pasangan calon terdiri dari dua komposisi etnis, yaitu Jawa-Lampung atau Lampung-Jawa.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini membahas tentang Politisasi identitas pada Kampanye Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Dengan menggunakan teori politik identitas dan teori kampanye.

Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Masalah yang diteliti yaitu adanya kampanye politik dalam pemasangan banner, spanduk, baliho dan lain-lain menggunakan unsur bahasa Jawa dalam penyampaian kampanyenya untuk mempengaruhi pemilih. Calon anggota dewan dalam penelitian beragam, ada yang menggunakan bahasa Jawa namun dia adalah orang nasrani dan bersuku batak berhasil menjadi pemenang dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Ada juga orang Jawa yang berkampanye dalam bahasa Indonesia dia bersuku Jawa dia berhasil menang juga, sedangkan calon yang bersuku Jawa yang menggunakan kampanye dengan bahasa Jawa dan menggunakan identitas putra daerah di wilayahnya namun gagal menjadi anggota legislatif. Adapun fokus dalam penelitian ini yang membedakan dari penelitian terdahulu yaitu pada aspek kampanye yang digunakan pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2019 yaitu memanfaatkan identitas untuk memobilisasi massa untuk kekuasaan. Sedangkan secara fokus dan tempat jelas berbeda dari penelitian terdahulu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah politisasi identitas oleh para calon pada kampanye pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui politisasi identitas yang dilakukan oleh para caleg pada kampanye pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dalam menjelaskan ragam politisasi identitas di wilayah formal. Sedangkan secara praktis tesis ini dapat menjadi bahan pertimbangan KPU Pusat tentang aturan tentang politik identitas atau SARA dan menjadi bahan pembelajaran baik untuk masyarakat pada umumnya dan calon anggota DPRD yang menggunakan politik identitas sebagai media kampanyenya kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Identitas

Identitas berasal dari bahasa Inggris “*identity*” yang mempunyai arti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri. Ciri-ciri ini dapat berupa ciri-ciri fisik maupun nonfisik. Sebagai jati diri, identitas memiliki dua pengertian. *Pertama*, merujuk pada sesuatu yang melekat dalam diri seseorang. *Kedua*, merupakan surat keterangan atau riwayat hidup seseorang. Identitas didapat melalui dua sumber, yakni aturan-aturan sosial yang menjelaskan definisi dari tingkah laku tertentu dan sejarah hidup seseorang. Identitas dapat diketahui dengan cara melakukan interaksi dengan orang lain. Interaksi ini menjadi jalan bagi seseorang untuk mendapatkan pengakuan atas identitasnya dan penentu diterima atau tidaknya seseorang dalam suatu golongan (Adrian, 2013: 23).

Menurut Richard Jenkins, identitas merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Hanya dengan membedakan identitas kelompok yang berbeda bahwa orang dapat mengkategorikan kepada orang lain. Identitas pada awalnya berkembang sebagai hasil dari proses kategorisasi. Berdasarkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing obyek. Ketika dilakukan dalam konteks sosial maka proses kategorisasi sosial (pengelompokan masyarakat berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki bersama oleh suatu kumpulan individu) akan terjadi dalam kondisi sang subjek (individu perilaku kategorisasi) sendiri berada dalam kategorisasi tersebut. Identitas terbentuk atas dua faktor yaitu; *pertama*, faktor internal yang memaknai apa yang kita pikirkan tentang identitas kita sendiri dan *kedua*, faktor eksternal yang memaknai bahwa bagaimana orang lain melihat kita dan bereaksi terhadap keberadaan kita. Mungkin muncul reaksi berbentuk penolakan, pembiaran atau mendukung dan memperkuat pandangan pihak luar tentang identitas diri tersebut. Jadi bagaimanapun, identitas itu muncul dari hubungan diri kita dengan orang lain. Identitas terbentuk akan adanya kestabilan

dalam hubungan dialektis antara faktor-faktor internal dan eksternal yang berinteraksi untuk menghasilkan sebuah identitas. Walaupun masing-masing individu yang memiliki identitas, identitas tetap berkaitan dengan kelompok-kelompok sosial yang mengidentifikasi mereka. Namun, selalu ada ketidakcocokan antara bagaimana seseorang berfikir tentang diri mereka sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka. Sebuah identitas tidak hanya memperhatikan kesan dari kita sendiri, tetapi juga dengan kesan orang lain kepada kita dan kesan kita kepada orang lain. Sebab selanjutnya identitas pribadi berbeda dengan identitas sosial (Zharfandy, 2016:21).

Richard Jenkins menguraikan mengenai pendekatan identitas ini, menurutnya bahwa identitas dibentuk dalam proses sosialisasi, melalui proses ini orang belajar untuk melihat dengan jelas membedakan kesamaan dan perbedaan sosial yang signifikan terutama diantara satu dengan yang lainnya. Mereka akan menemukan orang-orang yang memiliki identitas yang berbeda dengan dirinya. Ketika mereka menemukan dengan kelompok yang satu identitasnya maka pasti akan ada interaksi saling berbagi dan kebersamaan.

Proses pembentukan identitas adalah sebuah proses yang berjalan secara sosial. Dan identitas menjadi penting bagi seseorang ataupun individu karena identitas memiliki dua fungsi yaitu: menentukan batas-batas diri (*egoboundaries*), dan menerjemahkan kenyataan lingkungan kedalam kategori-kategori tertentu berdasarkan persepsi individu akan kesamaan karakteristik masing-masing elemen lingkungan tersebut. Kedua fungsi identitas itu kemudian memungkinkan individu untuk memberi makna, reaksi dan respon tertentu terhadap lingkungannya sesuai bentuk-bentuk perilaku yang dianggap dapat mempertahankan atau tambah memperpanjang keberadaannya sebagai individu. Kegagalan dalam menentukan batas-batas diri, dan atau melakukan kategorisasi yang tidak tepat akan berakibat fatal bagi keberlangsungan diri individu (Zharfandy, 2016:22).

Pembentukan identitas tidak hanya berhubungan dengan interaksi individu. Hal ini juga terkait dengan kelompok-kelompok sosial yang lebih besar.

Interaksi mengarah ke pembangunan batas atau garis pemisah, antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda yang membawa identitas yang berbeda. Selain itu, identitas juga terkait erat dengan posisi sosial, khususnya dalam organisasi. Organisasi mengklasifikasikan orang dengan jabatan dan pangkat dan orang tidak hanya bebas memilih posisi mereka sendiri dalam organisasi. Adanya identitas berarti bahwa identitas tidak pernah benar-benar cair dan hanya pilihan materi. Jenkins mengatakan bahwa keberadaan identitas sosial diperoleh dan dialokasikan dalam hubungan kekuasaan. Identitas adalah sesuatu di mana ada perjuangan berlangsung dan dengan strategi yang lebih maju dari yang lain.

Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan *belonging* tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas (Widayanti, 2009: 14). Namun demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau wanita. Sedangkan untuk identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, juga status yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan.

Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (*citizenship*)). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*) (Setyaningrum, 2005: 19).

Secara sederhana, apa yang dimaksud identitas didefinisikan sebagai karakteristik esensial yang menjadi basis pengenalan dari sesuatu hal. Identitas

merupakan karakteristik khusus setiap orang atau komunitas yang menjadi titik masuk bagi orang lain atau komunitas lain untuk mengenalkan mereka (Widayanti, 2009: 13). Ini adalah definisi umum yang sederhana mengenai identitas dan akan kita pakai dalam pembahasan berikutnya mengenai politik identitas.

Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain.

## **2.2 Politik Identitas**

Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan “politik identitas” (*political of identity*). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005:19). Menurut Stuart Hall, identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari *sense* (rasa/kesadaran) terhadap ikatan kolektivitas. Dari pernyataan tersebut, maka ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan *otherness* (keberbedaan) atau sesuatu yang diluar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif, melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (*categories of difference*). (Setyaningrum, 2005:26).

Gagasan politik yang didasarkan pada identitas kelompok, yang bertentangan dengan kepentingan, reformasi ideologi, telah memasuki kesadaran publik sejumlah negara demokratis selama dua dekade terakhir. Ini telah menjadi subjek

dan sumber harapan dan ketakutan yang bertolak belakang bagi para aktor dan pemikir politik. Dalam teori politik Anglophone, gagasan ini dikaitkan dengan beberapa pertikaian filosofis yang kontroversial mengenai topik-topik seperti manfaat mengalokasikan hak kepada kelompok minoritas; apakah 'perbedaan' sekarang merupakan prinsip yang mengatur melalui mana kedirian dan moralitas berlaku dalam (*post*) masyarakat modern; implikasi ketidaksepakatan moral dan pluralisasi sosial untuk kemungkinan kerjasama politik kononketidakterbandingan nilai-nilai politik dan tantangan moral dan sosial yang dihadapi masyarakat sipil dan kewarganegaraan demokratis. Gagasan politik identitas telah menjadi menonjol karena terkait dengan banyak perkembangan berbeda dan keprihatinan politik topikal, dan menimbulkan reaksi yang kuat dari kawan dan musuh-musuhnya. Interpretasi politik identitas ini sebagai deskripsi kolektif dari kekuatan-kekuatan sosial yang telah mencoba mempolitisasi perpecahan yang pernah dianggap sewenang-wenang dan non-politik adalah sesuatu yang populer, tidak terkecuali dikalangan intelektual simpatik (Michael Kanny, 2004 : 1).

Politik identitas merupakan sikap politik yang fokus pada sub kelompok dan merujuk pada aktivisme atau pencarian status yang dilandaskan pada kategori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya. Isunya pada orientasi politik kelompok subnasional melihat perbedaan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Di luar itu, politik identitas juga dapat mengacu pada identitas kebangsaan atau identitas diri (*self-identity*) yang melintasi batas-batas etnik atau nasionalisme, misalnya isu wanita dan imigran. Politik identitas adalah ciri yang tidak dapat dihindari dari demokrasi liberal, sebab sistem politik itulah yang memberikan ruang bagi tumbuhnya upaya-upaya kelompok dalam mengartikulasikan kepentingan dan tujuannya. Namun identitas dalam demokrasi memuat masalah lain, karena identitas kelompok lebih bersifat memberi batasan ketimbang membebaskan individu. Selain itu, dalam demokrasi deliberatif yang mengutamakan dialog, klaim politik identitas tidak selalu mendukung nilai-nilai kebebasan dan keadilan, tetapi juga klaim yang dapat mengancam atau merusak nilai-nilai tersebut. Permasalahan lainnya dari perjuangan politik identitas ialah

siapa yang memberikan hak kepada kelompok yang mengatas namakan identitas, misalnya agama atau etnis. Sementara etnis dan agama adalah konsep yang dibangun secara sosial. Artinya, konsepsi dan batasan identitas dapat ditafsirkan secara beragam, sehingga menimbulkan ambiguitas terkait kepentingan dan tujuan siapakah yang diemban dalam perjuangan politik identitas (Herdiansyah, 2014: 172).

Di Inggris dan Eropa Barat lebih umum, politik identitas secara luas dianggap sebagai produk dari konflik politik yang terkait dengan bentrokan antara praktik budaya mayoritas dan berbagai imigran dan minoritas agama. Di antara para ahli teori Australia dan Kanada, misalnya, ini dianggap sebagai gerakan yang memimpin perjuangan orang-orang miskin atas hak atas tanah. Di AS, gagasan identitas politik diterapkan dalam kaitannya dengan ketegangan yang telah lama terjadi antara kelompok-kelompok agama dan negara, moral dan perjuangan politik yang terkait dengan keinginan separatis kelompok-kelompok seperti Amish, dan dalam menanggapi arti-penting ras dan etnisitas dalam kehidupan politik (Michael Kanny, 2004: 3).

Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik sehari-hari. Karena itu para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Misalnya saja Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L Morowitz dalam (Haboddin, 2007: 119), pakar politik dari Universitas Duke, mendefinisikan politik identitas adalah memberikan garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen (Haboddin, 2007: 120).

Kemala melangkah lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis yang biasanya digunakan sebagai alat memanipulasi alat untuk menggalang politik guna kepentingan ekonomi dan politik. Namun, pada bagian yang lain, argument Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa: Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk: *Pertama*, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial-budaya. *Kedua*, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. *Terakhir*, kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya (Haboddin, 2012: 120).

Politik identitas menurut (Ma'arif, 2012:55) menjelaskan bahwa, politik identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas tersebut. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sangat sentral dalam wacana politik mereka, sehingga lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan. Secara historis, politik identitas di Indonesia bisa bermuatan etnisitas, agama, dan ideologi politik. Agenda yang mereka perjuangkan menjadikan Islam sebagai ideologi utama dalam menyebarkan gagasan. Penyebaran gagasan, yang menjadikan Islam sebagai ideologi menimbulkan pertentangan antara agama di satu sisi, dengan negara pada sisi lain.

Klause Van Beyme dalam (Yandra, 2010:21), menganalisis dan mencoba melihat wacana gerakan sosial politik yang didasarkan atas politik etnis dalam beberapa tahap perkembangannya mulai era pramodern, modern, dan postmodern. Dimana Ia menggambarkan pola-pola gerakan, motivasi, dan tujuan yang hendak dicapainya maka ia mengungkapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pola Politik Identitas Etnis

| Model Teori | Pola Keterangan   | Pola Aksi  | Tujuan Gerakan       |
|-------------|---|--|----------------------|
| Pra Modern  | Perpecahan Objektif (dimana ada perpecahan fundamental pasti ada gerakan sosial yang menyeluruh)  | Mobilisasi secara ideologis atas inspirasi pemimpin          | Perampasan Kekuasaan |
| Modern      | Pendekatan Kondisional (keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk di mobilisasi).  | Keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah | Pembagian Kekuasaan  |
| Postmodern  | Gerakan tumbuh dari dinamikanya sendiri. Protes muncul dari berbagai macam kesempatan individual. Tidak terdapat satu pecahan yang dominan. | Kesadaran diri   | Otonomi              |

Sumber:(Yandra, 2018: 7)

Ciri khas yang ada dalam politik identitas, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kesamaan dan tujuan untuk membentuk kekuatan berdasarkan peta politiknya.
2. Simbol, suku atau agama yang digunakan dan program yang ditawarkan
3. Ketidakpuasan yang muncul dari masyarakat yang merasa terpinggirkan
4. Memberikan jalur politik alternatif untuk menyatukan kekuatan dalam rangkaian agenda demokrasinya.(Dosensosiologi.com)



### 2.3 Politisasi Identitas

Politisasi identitas artinya identitas dipolitisasi melalui pendekatan dan interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Identitas kerap dipolitisasi oleh anggota mereka sendiri dengan menampakkan diri mereka sebagai bagian dari identitas tersebut. Politisasi identitas nampak muncul dari berbagai cara, seperti pemakaian atribut-atribut identitas daerah dan penggunaan bahasa yang bersangkutan. Politik pemilu pasca 2014 ditandai dengan menguatnya politisasi identitas. Isu-isu yang berkaitan dengan etnik, agama, atau ideologi tertentu digunakan oleh sebagian elite politisi untuk membangun citra negatif lawan-lawan politiknya demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap kelompok identitas untuk turut berpartisipasi dan mencapai kepentingannya. Akan tetapi, politisasi identitas juga berpeluang melemahkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri apabila menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik. Politisasi (*politicization*) merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Sementara yang dimaksud identitas sesuai dengan pengertian yang berlaku dalam ilmu politik dan sosiologi, yakni kategori sosial di mana orang-orang yang ditempatkan pada suatu kategori diasumsikan memiliki ‘identitas’ yang sama. Identitas kemudian digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dari kelompok yang bersangkutan politisasi identitas diartikan sebagai upaya untuk menggunakan, mengeksploitasi, atau memanipulasi identitas apakah itu berbasis agama, etnik, atau penganut ideologi tertentu untuk menimbulkan opini atau stigma dari masyarakat dengan tujuan kepentingan politik (Herdiansah, 2017).

Politisasi identitas tidak terlepas dari masih lemahnya institusionalisasi partai politik di Indonesia, sehingga mendorong para politisi berkolaborasi dengan aktor-aktor *civil society* untuk mereproduksi isu-isu identitas demi kepentingan

pemilu. Salah satu faktor lemahnya institusionalisasi partai politik, yakni personalisasi partai politik oleh figur pemimpinnya yang terhubung dengan jejaring basis massa yang tidak jarang merepresentasikan identitas tertentu. Hal tersebut menjadikan politisasi identitas semakin terfasilitasi dalam berbagai ajang pemilu. Masih segar dalam ingatan kita, berbagai ragam peristiwa politisasi agama yang terjadi di DKI Jakarta menjelang putaran satu dan dua. Korban individu politisasi agama paling dikenal di Jakarta adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, setelah itu disusul Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Rano Karno di Banten. Dari sejumlah rangkaian peristiwa tersebut sebagaimana besarnya dilakukan aktor non-negara antara lain oleh Front Pembela Islam (FPI) dan selebihnya dilakukan oleh aktor-aktor lain. Jika dicermati, masalah terbesar dari politisasi agama ini justru terjadi setidaknya karena dua hal. *Pertama*, kelompok ekstremisme seringkali menggunakan idiom atau simbol agama secara eksekif dan tidak tepat diruang-ruang public. *Kedua*, adanya usaha-usaha sistemik sebagian kelompok yang memanfaatkan sentimen teologis, etnis, perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap kelompok yang berbeda untuk meraih dukungan politik (Shofan, 2018:5).

Perkembangan politisasi identitas dalam pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi itu sendiri. Perjuangan solidaritas kelompok di sisi lain juga mengandung upaya mempromosikan ketidaksetaraan hak sipil dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Padahal, dalam kehidupan yang demokratis, partisipasi dari seluruh institusi sosial diperlukan untuk mencapai kepentingan-kepentingan publik yang adil. Lebih lanjut, politisasi identitas yang melibatkan gerakan-gerakan massa akan mengganggu roda perekonomian. Kondisi sosial politik yang tidak stabil akan mengikis kepercayaan investor dan menyulitkan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Pertentangan politik berdasarkan identitas pun dapat merusak modal sosial, sehingga menurunkan kapasitas masyarakat dalam menghasilkan pencapaian-pencapaian terbaiknya (Herdiansah, 2017: 171).

### **2.3 Politisasi Identitas Etnis pada Kampanye**

Clifford Geertz dalam Hussin Mutalib (1995:39) mengungkapkan etnisitas menjadi karakter kualitas atau kondisi yang dimiliki oleh suatu kelompok etnis, ataupun kelompok etnis itu sendiri. Geertz mengidentifikasi berbagai karakteristik askriptif disekitar kelompok etnis, yaitu ikatan darah, ras, pola-pola dominasi, bahasa, agama, adat istiadat, geografi dan sejarah. Berdasarkan beberapa definisi diatas, politisasi etnis akan rentan sekali terjadi apabila masalah etnis telah diangkat dalam isu-isu pemilu.

Etnis sebagai instrumen politik yang dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi massa memang dapat mendorong terjadinya fragmentasi dimasyarakat, namun ketika berbicara permasalahan strategi politik, tentunya setiap partai melihat segala kemungkinan agar dapat mengakomodasi apa yang menjadi orientasi pemilih dalam memilih pada Pilkada. Dengan berlangsungnya sentiment sentimen etnis dan potensinya untuk mangacaukan ataupun dipolitisir oleh kelompok-kelompok tertentu, pemerintahan yang dalam hal ini menaungi masyarakat yang majemuk, hendaknya mencurahkan perhatian yang besar sekali dalam upaya menangani dan menanggulangi masalah etnis ini. Realitas dan kekuatan kelompok-kelompok etnis dalam proses politik saling berkaitan dnegan dipertahankannya secara terus menerus ikatan-ikatan primordial dikalangan komunitas-komunitas etnis dan juga politisasi etnisitas dalam masalah-masalah kenegaraan, terutama melalui proses penekanan, ideologisasi, persatuan, dan modifikasi warisan-warisan budaya kelompok-kelompok etnis yang khas dan unik.dinamika etnisitas ini tampak padapembelahan etnik berdasar religius, ekonomi dan politik.Pembelahan-pembelahan etnisitas ini mewujud dalam sentimen antarkampung, sentimen antar klan (marga) dan descendant, sentiment agama, sentimen teritorial, sentimen etnik dan sentimen kultural.Keseluruhan atribut-atribut etnisitas ini mengalami penguatandengan cara di politisasi guna

mencapai kepentingan etnik yakni membentuk wilayah baru (pemekaran), menjadi kepala daerah (pilkada) ataupun distribusi jabatan ataupun birokrat daerah. Pada taraf tertentu, kemantapan strategis etnisitas dipermaikan sebagai alat, strategi atau taktik dan kelompok kepentingan guna mencapai kepentingan aktor politik pada level lokal (Damanik, 2018: 1).

Menurut Ubed Abdilah S dalam *Politik identitas etnis: Pergulatan tanda tanpa identitas* (2002:76) terdapat tiga pendekatan teoritis yang digunakan dalam melihat fenomena etnisitas.

### 1. Pendekatan Primordialisme

Primordialisme melihat fenomena etnis dalam kategori sosio-biologis. Pendekatan ini umumnya beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran seperti kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial yang disadari secara objek sebagai hal yang "given" dari sananya dan tidak bisa dibantah.

### 2. Pendekatan Konstruktivisme

Pendekatan ini dikembangkan oleh *Frederik Barth* yang memandang identitas etnis sebagai hasil dari proses sosial yang kompleks, manakala batasan-batasan simbolik terus-menerus membangun dan dibangun oleh manfaat mitologi, suatu hitungan sejarah dari bahasa dan pengalaman masa lampau.

### 3. Pendekatan Instrumentalisme

Instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras, dan bahasa.

Pendekatan pertama, argumentasi primordialisme yang melihat fenomena agama atau etnis dalam kategori sosio-biologis. Pandangan ini berpandangan bahwa kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran wilayah, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial sebagai hal yang 'given' dan tidak bisa

dibantah. Secara konseptual, pandangan ini menekankan kehadiran identitas etnik dan agama primordial memiliki fungsi sebagai perekat sebuah komunitas. Secara definitif, para penganut paham primordialisme menekankan pada upaya pencapaian kepentingan kolektif dan kemampuan identitas kolektif untuk mendefinisikan dan mengartikulasi pandangan umum masa lalu dan saat ini. Sekaligus juga membentuk visi untuk masa depan (Sari, 2016:149).

Pendekatan primordial mengemukakan bahwa kepentingan individual anggota etnik dibuat untuk menunjang kepentingan kelompok dan pimpinannya untuk memperkuat basis etnik sebagai sumber kekuatan sosial. Namun, pendapat ini tidak bisa dipertahankan secara metodologis karena membatasi ruang tafsir dan penerangan akan perubahan dari fenomena sosial yang terjadi secara waktu ke waktu. Seperti yang dilakukan oleh Max Weber yang menjelaskan etnisitas sebagai kumpulan orang yang menghibur kepercayaan subjektif dalam nyanyian mereka karena kesamaan-kesamaan fisik, agama, atau karena kenangan koloni dan migrasi (Sari, 2016:149)

Pendekatan kedua adalah konstruktivis yang dikembangkan oleh Frederik Barth. Teori ini memandang identitas agama dan budaya, sebagai hasil dari proses yang kompleks, manakala batas-batas simbolik terus dibangun dan membangun, oleh manfaat mitologi yang berlangsung melalui bahasa maupun pengalaman masa lampau. Frederik Barth lebih jauh berargumentasi bahwa agama dan etnisitas mengalami perubahan terus-menerus dan bahwa batas keanggotaan suatu kelompok etnik sering dinegosiasikan dan dinegosiasikan kembali. Tergantung pada perjuangan politik di antara kelompok-kelompok yang ada. Frederik Barth menyebut fenomena negosiasi identitas ini sebagai situasional. Pada batas ini, para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol budaya dan menampilkan perilaku etnik tertentu yang berubah-ubah dari waktu-kewaktu, sesuai situasi tertentu, atau sesuai dengan kepentingan pribadi atau sosial (Sari, 2016:149). Dalam penelitian ini di temukan bahwa Sagang Nainggolan yang merupakan Suku Batak dan beragama Kristen namun dalam memperjuangkan politiknya ia mengunkan bahasa dan Etnik Jawa dalam Kampanyenya. Hal tersebut ia lakukan karena ia sudah lama berada dalam lingkungan yang mayoritas orang Jawa.

Hal ini dianggap penting sebab sangat terkait dengan citra diri (self image) dan harga diri (self esteem) baik sebagai individu maupun kelompok. Identitas-identitas inilah yang akan selalu dialami, dikomunikasikan, diolah, ataupun dikonstruksi setiap individu dalam berinteraksi. Meskipun pada dasarnya seseorang memiliki banyak sisi dalam hal pengungkapan identitasnya, namun menurut Barth identitas ke-etnikan dan agama seseorang selalu menjadi hal utama untuk membangun kategori pembeda (Sari, 2016:150).

Di antara sekian banyak identitas seseorang yang akan ditampilkan, sesungguhnya identitas etnik dan agama akan selalu mendapat ruang atau tempat dalam diri seseorang. Konsep identitas situasional menjelaskan bahwa setiap individu akan melakukan proses komunikasi, melalui pertukaran simbol, pembentukan makna, dan setting bertujuan dalam keseharian mereka sesuai situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai (Sari, 2016:150)

Budaya yang dominan atau budaya pribumi yang biasa mempengaruhi budaya minoritas atau budaya pendatang. Selanjutnya budaya minoritas terpengaruh oleh budaya yang dominan akibat dari tekanan-tekanan lingkungan budaya itu sendiri. Kemudian menjelaskan dua pandangan soal ini: Pertama, batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku-suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain adanya perbedaan etnik dan agama tidak ditentukan oleh terjadinya pembauran, kontak dan pertukaran informasi, namun lebih disebabkan oleh adanya proses-proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan. Pandangan Barth ini melihat bahwa perbedaan kategori tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnik dan agama dalam perjalanan hidup seseorang. Semuanya dijadikan relasi penting untuk mempertahankan kekuasaan etnik (Barth, 1988:10).

Kedua, dapat ditemukan hubungan sosial yang kuat, bertahan lama, dan penting di antara dua kelompok etnik dan agama yang berbeda. Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya status etnik dan agama yang berbeda tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial. Tetapi menurut Barth, status sosial etnik dan agama terbentuk oleh sistem sosial tertentu. Setiap

etnik dan agama dapat berkembang dan bertahan serta mempunyai nilai-nilai budaya dan moral sehingga menjadi ciri khas identitas itu sendiri dalam berinteraksi. Demikian halnya setiap identitas ditandai dengan sistem komunikasi dan pola interaksi. Ciri kelompok etnik dan agama tersebut dapat diterima dan dapat dibedakan dengan kelompok lain yang berlangsung secara sosial dalam interaksi mereka (Barth, 1988:10).

Pendekatan konstruktivisme Barth, meyakini pembentukan batas-batas dan ciri khas tersebut ditentukan oleh kelompok itu sendiri yang kemudian membentuk polanya sendiri. Adanya perbedaan etnik dan agama dalam masyarakat lebih disebabkan oleh proses mempertahankan status etnik dan agama di dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks hubungan tersebut, Frederik Barth meyakini bahwa kelompok minoritas menjadi subordinat kelompok mayoritas yang mendominasi sosialitas hubungan ini. Pada kondisi ini, yang minoritas inilah yang menjadi etnik dan agama, menjadi unik, atau bahkan terasing dan aneh (Barth, 1988:10).

Pandangan ketiga dalam kacamata teoritis, kalangan instrumentalisme lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik. Menurut pandangan ini, manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut awal etnisitas seperti kebangsaan, agama, ras dan bahasa, maka pada saat tersebut, kelompok itu sedang melakukan mobilisasi kepentingan mereka. Kalangan Intrumentalisme menjelaskan bahwa identitas etnik dan agama senantiasa dijadikan sebagai sarana elit etnik dan agama memanipulasi identitas tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Pandangan ini mengasumsikan bahwa mereka yang minoritas akan cenderung dijadikan sebagai alat untuk menguntungkan kelompok mayoritas (Sari, 2016:151).

Politisasi identitas akhirnya dipilih oleh setiap kandidat dan pemilu maupun pilkada, hal ini merupakan strategi yang digunakan untuk dapat memobilisasi pemilih untuk dapat menentukan pilihannya. Di tengah minimnya kampanye yang programatik serta masa kampanye yang panjang politisasi identitas akhirnya di

pilih sebagai solusi dan strategi yang efektif untuk mempengaruhi dan memobilisasi pemilih guna kepentingan pemilu. Kampanye yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol agama dan etnis yang tersebar luas di spanduk dan baliho yang disusun oleh tim sukses para kandidat (Ruslan, 2015:3).

Kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi yang melibatkan unsur-unsur dari partai politik, yang bertujuan untuk menarik pemilih. Menurut Noris dalam (Firmanzah, 2010:271) mendefinisikan kampanye politik adalah suatu proses komunikasi politik dimana partai politik atau kontestan individu berusaha mengkomunikasikan ideologi program kerja yang mereka tawarkan. Dalam kampanye yang diberikan biasanya kontestan baik parpol maupun kontestan individu menonjolkan program dan visi misinya untuk membentuk suatu image yang positif di mata pemilih.

Kampanye juga diartikan sebagai periode oleh panitia pemilu kepada semua kontestan, baik partai politik atau perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan (Lilleker & Negrine 2000). Kampanye dalam kaitan ini dilihat sebagai aktivitas pengumpulan massa, parade music, orasi politik, pemasangan atribut (spanduk, banner, baliho, poster dll) dan pengiklanan baik di media cetak atau elektronik (Firmanzah, 2010:271).

Menurut (Urbaningrum, 2004:268) Kampanye ibarat fungsi pemasaran, menawarkan dengan partai untuk bisa dibeli oleh konsumen politik, yakni para pemilih. Jadi relasinya bagaikan produsen dan konsumen senantiasa ditanggung oleh produsen. Sementara itu kampanye menurut Kotler dan Roberto dalam (Cangra, 2011:229) yaitu "*Campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent) which intends to persuade others (the target adaptor), to accept, modify, or abandon certain ideas, attitudes, practice behavior.*" Kampanye politik juga diartikan sebagai sebuah upaya yang diorganisasikan oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditunjukkan untuk memersuasi target



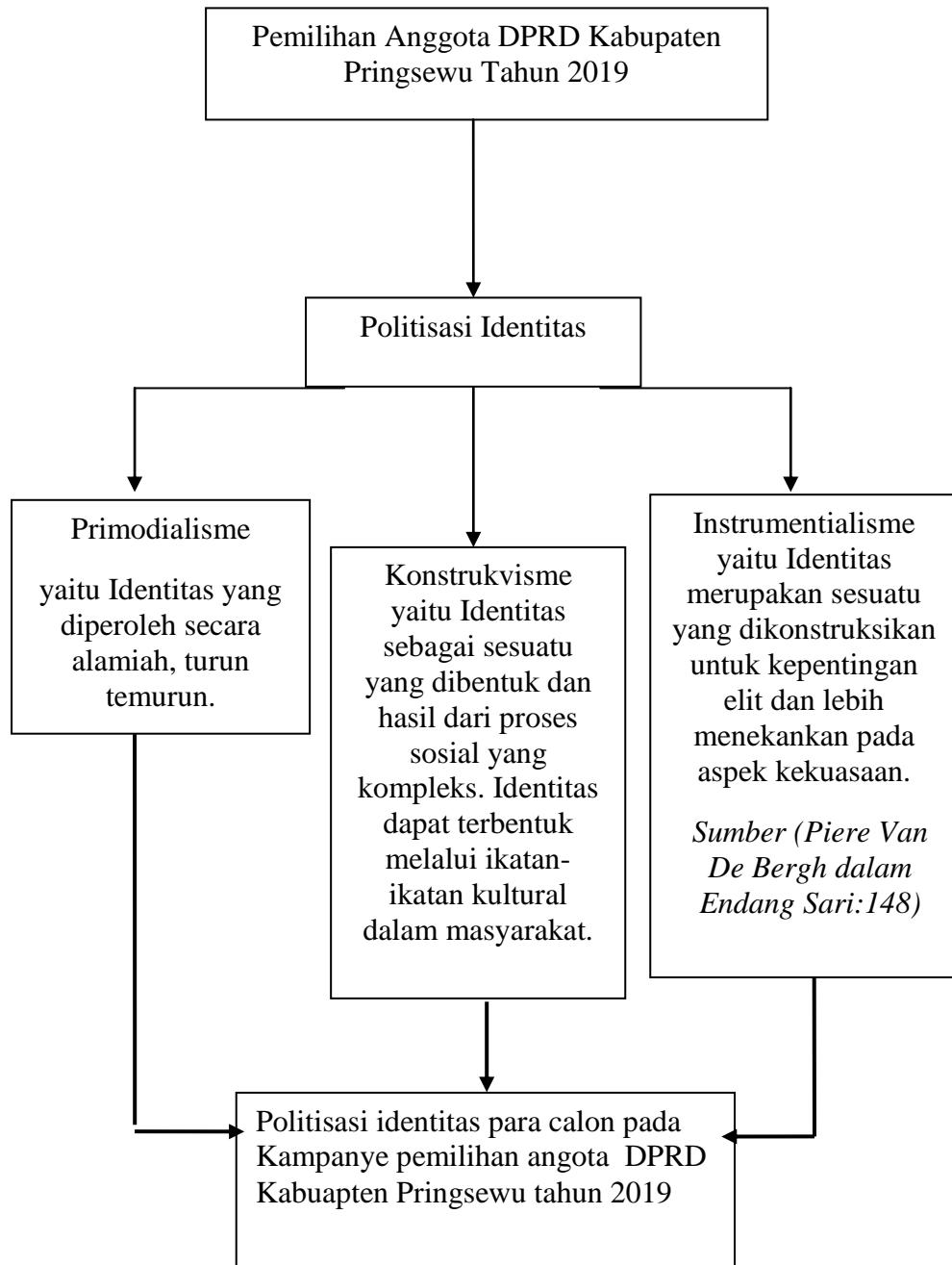
sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.

Para politisi saat ini memanipulasi politik identitas demi kepentingannya, misalnya kandidat harus merepresentasikan sub-sub kelompok yang ada di masyarakat (Wiarda, 2014). Elite politik memainkan peran penting dalam menentukan tujuan dan taktik. Klaim-klaim identitas seringkali dibentuk dan disalah arahkan oleh dinamika intra dan inter kelompok. Pada tingkat intra kelompok, elite dapat membingkai tradisi-tradisi kelompok untuk memelihara kekuasaan dan otoritasnya menghadapi potensi pertentangan baik dari dalam maupun luar kelompok. Elite-elite minoritas seringkali mereproduksi perasaan diskriminasi sebagai alasan perjuangan (Eisenberg and Kymlicka 2011: 3). Elite politik sering bertindak seperti entrepreneur melakukan strategi-strategi yang oportunistik tentang bagaimana memobilisasi identitas untuk meningkatkan status baik dalam masyarakat yang lebih luas maupun dalam kelompoknya. Politisasi identitas tidak hanya berwujud sebagai ekspresi perasaan atau pandangan kelompok tentang pengalaman tertentu misalnya diskriminasi, tetapi juga sebagai kendaraan instrumental dan oportunistik bagi elite yang orientasi kepentingan pribadi (Weinstock, 2006).

Alcoff and Mohanty (2006: 2) menunjukkan bahwa pertarungan politik yang memanipulasi dengan isu-isu identitas akan menyebabkan elite-elite politik cenderung mudah menggunakan isu-isu yang dapat memobilisasi massa secara efektif. Selain itu, penggunaan isu-isu identitas juga menggambarkan ketidakmampuan partai-partai politik untuk menunjukkan kinerja secara substantif, sehingga pertanyaan lebih diarahkan pada isu-isu non substansial. Isu-isu substansial lebih dipahami oleh masyarakat dibandingkan dengan isu-isu kebijakan.

## 2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan pada konsep diatas maka kerangka pikir dalam penelitian ini seperti pada bagan di bawah ini.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu model penelitian yang dimaksud membuat analisis terhadap gambaran (deskriptif) mengenai data, informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan data berupa kata-kata atau pernyataan dari seseorang (Harahap, 2020:35). Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui data statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrument kunci.

Pemilihan pendekatan kualitatif ini dipilih karena dalam penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena politisasi identitas pada kampanye pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dengan menceritakan kejadian dan fenomena yang terjadi dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu 2019 karena adanya penggunaan politik identitas di dalamnya yang dilakukan oleh para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, sehingga perlu diceritakan secara runtut setiap kejadian, fakta dan fenomena di lapangan dengan pendekatan kualitatif.

#### **3.2 Alasan Pemilihan Fokus**

Fokus dalam penelitian yaitu melihat pemanfaatan politisasi identitas dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, dengan melihat penggunaan politisasi identitas dengan menggunakan bahasa Jawa dan simbol-simbol keagamaan, dan politisasi wilayah yang dilakukan oleh para calon

anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam kampanye yang mereka bangun untuk mengperkenalkan masyarakat.

Aspek-aspek dalam penelitian yaitu untuk melihat strategi yang dibangun oleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu pada kampanye politiknya yang mengandung unsur politisasi identitas yaitu suku, bahasa, agama dan wilayah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Pierre Van De Bergh yang mengemukakan pembentukan politik identitas dengan pendekatan primordialisme, konstruktivisme dan instrumentalisme.

Peneliti memilih fokus dengan pendekatan instrumentalesme dalam penelitian ini, karena setiap calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu memiliki identitas yang beragam namun dengan proses dan interaksi sosial dan komunikasi yang sudah terjalin dengan lama membentuk sebuah identitas bagi calon anggota DPRD dan dijadikan alat dan di mobilisasi untuk kepentingan para calon. Fokus pertama yaitu dengan politisasi etnis/bahasa dalam hal penggunaan etnis/bahasa yang dominan di Kabupaten Pringsewu yaitu bahasa Jawa dan simbol Jawa yang digunakan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam sebaran kampanyenya baik melalui media massa maupun yang terdapat di stiker, spanduk, *banner*, baliho, kaos dan lain-lain untuk bisa merebut hati suara mayoritas warga yang bersuku Jawa.

Fokus kedua yaitu politisasi agama yang berupa pemanfaatan tokoh agama, simbol-simbol keagamaan dan lain sebagainya sehingga menimbulkan citra yang alim, agamis oleh masyarakat/pemilih. Agama adalah hal yang sensitif bagi para pemeluknya karena langsung bersentuhan dan merupakan suatu komunitas suara yang biasa dimanfaatkan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu untuk diperebutkan suaranya. Hal tersebutlah yang selalu dimanfaatkan menjadi alat oleh calon dan tim sukses untuk merebut atau memenangkan dan mempertahankan kekuasaan dan hal tersebut telah dibangun oleh calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu selama masa kampanye yang diberikan oleh penyelenggara, dan tak segan para calon akan berubah menjadi

alim dan akan lebih Islami apabila ada acara-acara pengajian, doa dan zikir bersama serta membangun hubungan dengan tokoh agama disetiap desa yang menjadi basis kemenangannya.

Fokus ketiga yaitu dengan politisasi wilayah dengan menggunakan kesamaan daerah asal atau tempat tinggal yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Wilayah merupakan sesuatu yang dimainkan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dengan alasan apabila mengamankan satu daerah atau desa dimana calon anggota DPRD tersebut tinggal maka dia bisa untuk merebut atau mempertahankan kekuasaannya. Sentiment ini dimainkan untuk mempertahankan dan meyakinkan pemilih yang ada desanya dengan mengedepankan kesamaan wilayah tersebut. Sedangkan calon yang berasal dari daerah yang berbeda menggunakan pendekatan kontrukvisme seperti hal sebelumnya untuk merebut hati pemilih dengan melakukan interaksi sosial dengan suara mayoritas dengan pemilih yang masih abu-abu dan belum dimasuki oleh calon yang lain.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh melalui dua sumber data yaitu data primer dan sekunder (Sugiyono, 2016: 225). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan datasekunder sebagai berikut:

1. **Data primer** adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu seperti calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019, Penyelenggara Pemilu, tokoh masyarakat dan pemilih yang memiliki pengetahuan sesuai fokus penelitian. Menurut (Hasan, 2000:68) Data primer adalah data yang

diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Adapun data primer yang diperlukan yaitu wawancara dengan informan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian.

2. **Data sekunder** yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya materi, dokumen, serta melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, majalah, serta karya tulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa catatan-catatan dari lembaga partai politik, koran, calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 dan tim sukses. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini juga didapatkan dari hasil pustaka berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politisasi identitas, berita kampanye para anggota DPRD, materi kampanye dan APK para anggota DPRD seperti simbol-simbol agama, etnis, bahasa yang digunakan dalam berkampanye.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data. Dalam kata lain pengambilan data kualitatif bersifat tentatif karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang ingin diperoleh (Harahap, 2020: 48). Data penelitian kualitatif biasanya berupa cerita, teks, foto/gambar dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan penelitian secara seksama, yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2016:231). Wawancara digunakan karena untuk mendapatkan informasi lebih yang tidak didapatkan didokumentasi maupun observasi, oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat atau perasaan seseorang terhadap suatu gejala, fakta atau peristiwa yang terjadi. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara tidak langsung, karena berbedanya para informan. *Interview* secara tak terstruktur (terbuka) merupakan *interview* dimana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat (Harahap, 2020: 53). Wawancara tidak terstruktur juga diartikan teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan ataupun tanpa menggunakan pedoman wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapat informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan informan yang dianggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian. Wawancara tidak terstruktur menekankan pada pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Perbedaan wawancara ini dengan wawancara terstruktur adalah dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon yang lebih bebas. Dalam wawancara tidak terstruktur pertanyaan tidak disusun terlebih dahulu, karena disesuaikan dengan keadaan dan ciri unik dari narasumber atau informan. Dalam wawancara tidak terstruktur peneliti perlu merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan wawancara meliputi hal-hal berikut :

1. Menemukan siapa informan yang akan diwawancarai.
2. Menghubungi/mengadakan kontak dengan informan untuk menginformasikan wawancara yang akan dilakukan.
3. Melakukan persiapan yang matang untuk melakukan wawancara.

## 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:289) menyebutkan bahwa studi dokumentasi adalah “Mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian. Yaitu dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaahan catatan penulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dokumen yang masih terdapat baik di KPU Kabupaten Pringsewu, dokumentasi yang terdapat dalam kampanye para calon, materi kampanye dan dokumentasi APK para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

### **3.5 Penentuan Informan**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dalam sebuah penelitian (Moleong, 2017:132). Penentuan sumber data yang peneliti lakukan pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian dengan metode kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hal yang penting dalam penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah tentang apa yang disebut dengan *key* informan bias. Terlepas dari itu semua, subjek dalam penelitian kualitatif (baik yang dipilih sebagai informan awal atau informan berikutnya), harus benar-benar memiliki predikat sebagai *key* informan yang sarat dengan informasi yang diperlukan sesuai tujuan penelitian.

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, maka informan yang akan dipilih adalah memiliki kriteria sebagai berikut antara lain yaitu informan merupakan orang yang paham tentang kepemiluan, terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu, merupakan bagian dari calon anggota DPRD, tim sukses, akademisi, tokoh masyarakat serta pemilih di Kabupaten



Pringsewu. Maka membuat tujuan penelitian ini dengan menentukan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu;

1. Caleg yang berkampanye dengan menggunakan bahasa Jawa atau dengan bahasa Indonesia.
2. Caleg yang memang orang Jawa dan non-Jawa
3. Caleg yang beragama non muslim.
4. Orang yang mengetahui tentang kampanye para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu (tim sukses)
5. Serta tokoh masyarakat, pemilih, LSM, akademisi dan anggota KPU Kabupaten Pringsewu yang memiliki pengetahuan tentang pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

Informan dalam penelitian ini sendiri terdiri dari:

Tabel.02 Daftar nama informan penelitian.

| No  | Nama                       | Agama   | Suku    | Pertimbangan                             |
|-----|----------------------------|---------|---------|--|
| 1.  | Suryo Atmono               | Islam   | Jawa    | Bahasa Jawa                              |
| 2.  | Sagang Nainggolan          | Kristen | Batak   | Bahasa Jawa                              |
| 3.  | Bejan Ariyanto             | Islam   | Jawa    | Bahasa Jawa                              |
| 4.  | Iin Irawan                 | Islam   | Jawa    | Bahasa Jawa                              |
| 5.  | Mustopa                    | Islam   | Jawa    | Bahasa Indonesia                         |
| 6.  | Rizki Raya Saputra         | Islam   | Jawa    | Bahasa Indonesia                         |
| 7.  | Saiman                     | Islam   | Sumendo | Tokoh Masyarakat                         |
| 8.  | Marsandi                   | Islam   | Jawa    | Tokoh Masyarakat                         |
| 9.  | Ifan                       | Islam   | Jawa    | Pemilih                                  |
| 10. | Farida Sihaloho            | Kristen | Batak   | Pemilih                                  |
| 11. | Mijo                       | Islam   | Lampung | Pemilih                                  |
| 12. | Eka Zalika                 | Islam   | Sunda   | Pemilih                                  |
| 13. | Dr. Nadirsah Hawari<br>M.A | Islam   | Lampung | Akademisi                                |
| 14. | Asep Yuli Prasetyo         | Islam   | Sunda   | Anggota Komunitas<br>Asep-Asep Pringsewu |

### **3.6 Teknik Pengolahan Data**

Setelah melakukan pengumpulan data dengan wawancara dan data diperoleh dari lapangan, tahap selanjutnya pengolahan data penelitian. Peneliti melakukan dua tahapan dalam proses pengolahan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan oleh (Moleong, 2017: 245) meliputi:

#### **1. Editing**

Proses ini merupakan dimana peneliti meneliti kembali data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi, guna menghindari kekeliruan ataupun kesalahan dalam penelitian. Tahap editing ini peneliti menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi politisasi identitas dan kampanye dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat dimengerti oleh pembaca.

#### **2. Interpretasi**

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data ini menggunakan model “analisis data mengalir”, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Samsu, 2017:105). Bahkan menurut Miles dan Huberman merupakan salah satu teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Miles-Huberman menyatakan bahwa data mengalir ini terdiri dari tiga aktivitas, yaitu reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Pada prinsipnya, kegiatan

analisis data ini dilakukan sepanjang kegiatan penelitian (*during data collection*), dan kegiatan yang paling inti mencakup penyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verification/conclusion (menarik kesimpulan). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan data dalam penelitian dengan memilih hal-hal yang pokok yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan dengan proses penelitian berlangsung dengan tidak menunggu data terkumpul banyak, pada penelitian kualitatif reduksi data dapat dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Pada penelitian ini, data-data yang diperoleh baik melalui studi dokumen maupun wawancara akan dirangkum dan ditentukan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian agar menjawab permasalahan penelitian.

## 2. Penyajian Data

Teknik ini, setelah data selesai direduksi tahap selanjutnya ialah penyajian data atau yang disebut *Display*. Data dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori dalam hal pemisahan data. Huberman dan Miles memaknai penyajian data sebagai “sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”, dengan demikian yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Pada penelitian ini proses penyajian data dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dari semua informan yang sudah peneliti tetapkan dalam penentuan informan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya peneliti menganalisis untuk dikategorikan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Data tersebut disajikan dalam bentuk informasi yang kemudian

dikaitkan dengan dokumen yang ada maupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta dielaborasi dengan teori yang digunakan, agar semua informasi yang ditampilkan bermakna.

3. *Conclusion Drawing/Verification.*

Pada tahap ini merupakan tahapan akhir dalam proses pengumpulan data yaitu, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian.

### **3.8 Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas keandalan (*realibilitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut (Moleong, 2014:324) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Triangulasi menurut (Moleong, 2014:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain melalui berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2014:247) triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, triangulasi teknik digunakan untuk menguji data yang diperoleh dari wawancara dengan pengamatan dan di uji lagi dengan data dokumentas

## **IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

### **4.1 Gambaran Umum Perolehan Kursi Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2009-2019**

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Pada awal mula pemerintahan Kabupaten Pringsewu hanya terdiri dari 8 Kecamatan 96 Desa dan 5 Kelurahan.

Kabupaten Pringsewu juga sudah 3 kali melakukan pemilihan anggota DPRD yaitu pada tahun 2009, 2014 dan 2019. Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu pada 2009 berjumlah 34 orang, 17 orang berasal dari anggota DPRD Kabupaten Tanggamus (daerah induk) yang berasal dari sejumlah Daerah Pemilihan (Dapil) Tanggamus yang masuk wilayah Kabupaten Pringsewu, yakni Dapil III meliputi Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, dan Ambarawa, Dapil IV meliputi Kecamatan Pardasuka, serta Dapil V meliputi Kecamatan Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, dan Banyumas, yang sekarang menjadi Dapil I, II, dan III Kabupaten Pringsewu, ditambah 17 calon anggota DPRD Pringsewu yang diambil berdasarkan hasil perolehan suara partai politik di wilayah yang masuk Kabupaten Pringsewu pada Pemilu 2009. Sedangkan jumlah partai politik pada pemilu 2009 diikuti oleh 34 partai politik.

Pada pemilu 2014 Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 Kecamatan dan terdiri dari pekon (sebutan desa untuk wilayah Kabupaten Pringsewu) sebanyak 126 pekon dan 5 kelurahan. Atas pertambahan jumlah penduduk maka ada penambahan jumlah pekon dan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pringsewu maka kuota untuk anggota DPRD Kabupaten Pringsewu bertambah menjadi 40 kursi yang terdiri dari dapil I Kecamatan Pringsewu 8 kursi, dapil II Kecamatan

Gading Rejo 8 kursi, dapil III Kecamatan Ambarawa dan Pardasuka 7 kursi, dapil IV Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara dan Banyumas 8 kursi, dapil V Kecamatan Sukoharjo dan Adiluwih 9 kursi. Partai politik pada pemilu 2014 berjumlah 12 partai politik nasional.

Pemilu 2019 tidak ada penambahan kursi untuk Kabupaten Pringsewu yaitu masih sama dengan pemilu 2014 berjumlah 40 kursi. Namun pembagian dapil berubah dari pemilu 2014 yaitu pada tahun 2019, dapil I Kecamatan Pringsewu 8 kursi, dapil II Kecamatan Sukoharjo dan Adiluwih 9 kursi, dapil III Gading Rejo 7 kursi, dapil 4 Pardasuka dan Ambarawa 7 kursi, dapil V Kecamatan Pagelaran, Pagelaran Utara, dan Banyumas 9 kursi. Sedangkan jumlah partai politik berjumlah 14 partai politik ditambah dengan PBB dan PKPI.

Sebaran partai politik yang memperoleh kursi dari tahun 2009-2019 akan di jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel. 03 Jumlah perolehan kursi DPRD Kabupaten Pringsewu

| No  | Partai Politik | Periode   |           |           |
|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                | 2009-2014 | 2014-2019 | 2019-2024 |
| 1.  | HANURA         | 3         | -         | -         |
| 2.  | PKPB           | 2         | -         | -         |
| 3.  | GERINDRA       | 2         | 6         | 5         |
| 4.  | PKS            | 2         | 3         | 4         |
| 5.  | PAN            | 4         | 6         | 5         |
| 6.  | PKB            | 1         | 2         | 6         |
| 7.  | PDIP           | 5         | 7         | 5         |
| 8.  | PPP            | 2         | 3         | 2         |
| 9.  | GOLKAR         | 4         | 6         | 7         |
| 10. | DEMOKRAT       | 4         | 3         | 4         |
| 11. | PKNU           | 3         | -         | -         |
| 12. | PDK            | 1         | -         | -         |
| 13. | PKPI           | 1         | 1         | -         |
| 14. | NASDEM         | -         | 3         | 2         |
|     | Jumlah         | 34        | 40        | 40        |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu tahun 2019 ada partai politik yang suaranya naik dan ada partai politik

yang mengalami penurunan suara. Partai yang mengalami kenaikan perolehan suara dan kursi anggota DPRD Pringsewu tahun 2019 yaitu partai Golkar, PKB, PKS dan Demokrat. Sedangkan partai yang mengalami penurunan suara yaitu, PDIP, NasDem, PKPI, PPP, Gerindra.

#### **4.2 Pelaksanaan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 dan telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 yang lalu merupakan Dasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga mencatat Pemilu Tahun 2019 dalam sejarah sebagai pemilu serentak pertama di Indonesia.

Pemilu Tahun 2019 ini diselenggarakan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Adapun rangkaian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 sebagaimana termaktub dalam Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada Peraturan KPU No. 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019.

UUD 1945 menyebutkan bahwa: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum. Selain itu, konstitusi juga menyatakan bahwa: Pemerintah daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, UU Pemilu secara eksplisit menyatakan bahwa: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan

dengan sistem proporsional terbuka. Dengan kata lain, sistem pemilu legislatif adalah sistem perwakilan berimbang daftar terbuka.

Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia yaitu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan DPD secara bersamaan. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus dengan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Daftar pemilih tetap atau biasa di sebut dengan (DPT) Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dalam tabel :

Tabel 04: Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pringsewu 2019

| No | Nama Kecamatan  | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | JUMLAH PEMILIH |         |         |
|----|-----------------|-----------------|------------|----------------|---------|---------|
|    |                 |                 |            | L              | P       | L+P     |
| 1  | Adiluwih        | 13              | 109        | 13.959         | 13.088  | 27.047  |
| 2  | Ambarawa        | 8               | 129        | 13.813         | 12.887  | 26.700  |
| 3  | Banyumas        | 10              | 78         | 8.207          | 7.796   | 16.003  |
| 4  | Gading Rejo     | 23              | 296        | 29.332         | 27.764  | 57.096  |
| 5  | Pagelaran       | 22              | 145        | 19.952         | 18.778  | 38.730  |
| 6  | Pagelaran utara | 10              | 57         | 5.922          | 5.325   | 11.247  |
| 7  | Pardasuka       | 13              | 129        | 13.689         | 12.675  | 26.364  |
| 8  | Pringsewu       | 15              | 312        | 28.767         | 27.910  | 56.777  |
| 9  | Sukoharjo       | 16              | 161        | 18.510         | 17.560  | 26.070  |
|    | Total           | 131             | 1.416      | 152.151        | 143.783 | 295.934 |

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 271/pl.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun penetapan alokasi kursi untuk Kabupaten Pringsewu dapat dilihat seperti di bawah ini:



Tabel 05: Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Pringsewu.

| No. | Daerah Pemilihan                  | Jumlah Penduduk | Alokasi Kursi |
|-----|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1.  | DP Pringsewu 1 meliputi Kecamatan |                 | 8             |
|     | 1.1 Pringsewu                     | 82,940          |               |
| 2.  | DP Pringsewu 2 meliputi Kecamatan |                 | 9             |
|     | 2.1 Adiluwih                      | 38.532          |               |
|     | 2.2 Sukoharjo                     | 53.330          |               |
| 3.  | DP Pringsewu 3 meliputi Kecamatan |                 | 7             |
|     | 3.1 Gading Rejo                   | 78.119          |               |
| 4.  | DP Pringsewu 4 meliputi Kecamatan |                 | 7             |
|     | 4.1 Ambarawa                      | 36.818          |               |
|     | 4.2 Pardasuka                     | 39.401          |               |
| 5.  | DP Pringsewu 5 meliputi Kecamatan |                 | 9             |
|     | 5.1 Pagealaran                    | 53.814          |               |
|     | 5.2 Pagelaran Utara               | 16.100          |               |
|     | 5.3 Banyumas                      | 22.126          |               |
|     | Jumlah                            | 421.180         | 40            |

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu

Tabel diatas menjelaskan bahwa pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu memperebutkan 40 kursi dari 5 dapil yang telah dialokasikan untuk diperebutkan oleh partai politik dan tentunya calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Adapaun jumlah Daftar Calon Tetap atau yang biasa disebut dengan (DCT) telah ditetapkan pada 20 September 2018 dengan jumlah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pringsewu 2019:

Tabel 06: Daftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Pringsewu 2019.

| No  | Partai Politik | Jumlah Daerah Pemilihan dalam dpt | Jumlah Calon Dalam DPT | Jenis Kelamin |     | Persentase Perempuan % |
|-----|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----|------------------------|
|     |                |                                   |                        | L             | P   |                        |
| 1.  | PKB            | 5                                 | 40                     | 24            | 16  | 40,0                   |
| 2.  | GERINDRA       | 5                                 | 40                     | 24            | 16  | 40,0                   |
| 3.  | PDIP           | 5                                 | 39                     | 23            | 16  | 41,0                   |
| 4.  | GOLKAR         | 5                                 | 40                     | 21            | 19  | 47,5                   |
| 5.  | NASDEM         | 5                                 | 40                     | 20            | 20  | 50,0                   |
| 6.  | GARUDA         | 2                                 | 4                      | 2             | 2   | 50,0                   |
| 7.  | BERKARYA       | 3                                 | 8                      | 4             | 4   | 50,0                   |
| 8.  | PKS            | 5                                 | 38                     | 23            | 15  | 39,5                   |
| 9.  | PERINDO        | 4                                 | 10                     | 6             | 4   | 40,0                   |
| 10. | PPP            | 5                                 | 36                     | 21            | 15  | 41,7                   |
| 11. | PSI            | 4                                 | 15                     | 8             | 7   | 46,7                   |
| 12. | PAN            | 5                                 | 40                     | 24            | 16  | 40,0                   |
| 13. | HANURA         | 4                                 | 12                     | 7             | 5   | 41,7                   |
| 14. | DEMOKRAT       | 5                                 | 37                     | 21            | 16  | 43,2                   |
| 19. | PBB            | 2                                 | 6                      | 4             | 2   | 33,3                   |
| 20. | PKPI           | 3                                 | 13                     | 8             | 5   | 38,5                   |
|     | Jumlah         | 67                                | 418                    | 240           | 178 | 42,6                   |

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu

Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang memperebutkan 40 Kursi yang terbagi dari 5 dapil diikuti oleh 16 partai politik dengan jumlah calon laki-laki berjumlah 240 dan calon perempuan berjumlah 178, sehingga total calon pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu berjumlah 418 dengan presentase perempuan sebanyak 42,6%.

Pemilu serentak 2019 telah berjalan dengan lancar dan aman sesuai dengan harapan dari masyarakat di Indonesia berdasarkan hasil rekapitulasi hasil pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 92/PL.01.9-Kpt/18/10/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Umum 2019 yaitu sebagai berikut:

Tabel 07: Calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 1

| No | Partai Politik | No. Urut DCT | Nama Calon Terpilih          | Suara Sah | Peringkat Suara Sah Dalam Partai Politik |
|----|----------------|--------------|------------------------------|-----------|--|
| 1. | PKB            | 2            | Bambang Sugeng Irianto, S.T. | 2.695     | 1  |
| 2. | GERINDRA       | 4            | Sudiyono                     | 1.648     | 1  |
| 3. | PDIP           | 1            | Hj. Retno Palupi             | 2.250     | 1  |
| 4. | GOLKAR         | 1            | Asita Nurgaya, S.E           | 1.718     | 1  |
| 5. | NASDEM         | 1            | Leswanda Putra               | 1.928     | 1  |
| 6. | PKS            | 2            | Homs Wastobir, S.T.          | 1.365     | 1  |
| 7. | PAN            | 1            | Asa Attorida El Hakim, SE.MM | 2.567     | 1  |
| 8. | DEMOKRAT       | 2            | Ir. Joni Sapuan              | 2.485     | 1  |

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu

Tabel 08: Calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 2.

| No | Partai Politik | No. Urut DCT | Nama Calon Terpilih            | Suara Sah | Peringkat Suara Sah Dalam Partai Politik |
|----|----------------|--------------|--------------------------------|-----------|--|
| 1. | PKB            | 1            | Maulana Muhammad Lahuddin, S.E | 4.218     | 1  |
| 2. | PKB            | 5            | Iin Irawan, S.Pd.I             | 1.257     | 2  |
| 3. | GERINDRA       | 1            | Amproni, S.E                   | 2.137     | 1  |
| 4. | PDIP           | 2            | Rizky Raya Saputra, S.H        | 2.532     | 1  |
| 5. | GOLKAR         | 2            | Lusi Ariyanti, S.H             | 3.301     | 1  |
| 6. | GOLKAR         | 1            | Sagang Nainggolan              | 2.694     | 2  |
| 7. | PKS            | 1            | Suryo Atmono                   | 773       | 1  |
| 8. | PAN            | 1            | Mustopa                        | 1.682     | 1  |
| 9. | DEMOKRAT       | 9            | Nurul Ekhwan                   | 2.990     | 1  |

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu

Tabel 9: Calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 3.

| No | Partai Politik | No. Urut DCT | Nama Calon Terpilih | Suara Sah | Peringkat Suara Sah Dalam Partai Politik |
|----|----------------|--------------|---------------------|-----------|--|
| 1. | PKB            | 7            | Muhammad Zuhdi, S.E | 1.307     | 1  |
| 2. | GERINDRA       | 1            | Rahwoyo, S.E        | 2.068     | 1  |
| 3. | PDIP           | 1            | Aris Wahyudi, S.T   | 2.022     | 1  |
| 4. | GOLKAR         | 1            | Anton Subagiyo, S.H | 1.986     | 1  |
| 5. | PKS            | 2            | M. Triaksono, S.P   | 2.324     | 1  |
| 6. | PAN            | 1            | Safrudin, S.Hi      | 1.582     | 1  |
| 7. | DEMOKRAT       | 4            | Mira Anita          | 3.961     | 1  |

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu

Tabel 10: Calon terpilih Pemilihan Dapil Pringsewu 4.

| No | Partai Politik | No. Urut DCT | Nama Calon Terpilih     | Suara Sah | Peringkat Suara Sah Dalam Partai Politik |
|----|----------------|--------------|-------------------------|-----------|--|
| 1. | PKB            | 1            | Hj. Mastuah, A.Md, Kep. | 1.605     | 1  |
| 2. | GERINDRA       | 1            | Najaruddin, S.E         | 2.335     | 1  |
| 3. | PDIP           | 1            | Suryo Cahyono, S.H      | 2.022     | 1  |
| 4. | GOLKAR         | 3            | Rita Irviani, S.E, M.M  | 2.295     | 1  |
| 5. | NASDEM         | 1            | Rohmansyah              | 1.468     | 1  |
| 6. | PPP            | 1            | Hj. Sururiyah           | 2.011     | 1  |
| 7. | PAN            | 7            | Yulian Munajat          | 1.482     | 1  |
|    |                |              |                         |           |  |

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu

Tabel 11: Daftar calon terpilih daerah pemilihan Pringsewu 5.

| No | Partai Politik | No. Urut DCT | Nama Calon Terpilih          | Suara Sah | Peringkat Suara Sah Dalam Partai Politik |
|----|----------------|--------------|------------------------------|-----------|--|
| 1. | PKB            | 5            | Hermawan                     | 2.417     | 1  |
| 2. | GERINDRA       | 1            | Umi Laila                    | 2.547     | 1  |
| 3. | PDIP           | 1            | Aminallah Adisyanto F. S.E.  | 1.559     | 1  |
| 4. | GOLKAR         | 1            | Suherman                     | 3.671     | 1  |
| 5. | GOLKAR         | 3            | Rini Anggraini, S.Pd         | 1.223     | 2  |
| 6. | PKS            | 3            | Melfi Anindya Larasati, S.Pd | 2.061     | 1  |
| 7. | PPP            | 2            | Johan Arifin                 | 1.632     | 1  |
| 6. | PAN            | 1            | Hartono Rosadi, S.E          | 1.869     | 1  |
| 7. | DEMOKRAT       | 2            | Ririn Puspitasari            | 2.178     | 1  |
|    |                |              |                              |           |  |

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu

Pemilu 2019 menggunakan penghitungan yang berbeda dengan pemilu 2014 metode penghitungan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 dengan menggunakan penghitungan *sainte league murni* perolehan suara bisa dikatakan merata di setiap dapil hanya dua partai yang bisa meraih 2 kursi dengan menggunakan penghitungan *sainte league murni* yaitu partai Golkar yang mendapatkan 2 kursi di dapil 2 dan 5 dan partai PKB yang juga mendapatkan 2 kursi di dapil 2.

Pada pemilu 2019 pemilih juga lebih condong untuk memilih kotokohan caleg ketimbang mencoblos partai politik. Berdasarkan DCT diatas calon yang terpilih dengan nomor urut 01 di partai politiknya berjumlah 22 orang. Dengan menggunakan sistem suara terbanyak peluang caleg nomor urut sama-sama terbuka untuk mendapatkan kemenangan tergantung keahlian dari calon tersebut merebut hati pemilih. Sedangkan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 yang menggunakan nomor urut 01 rata-rata adalah petahana yang kembali maju dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019. Faktor nomor urut menurut peneliti bukanlah faktor utama

yang membuat calon menang, namun nomor yang lain pun memiliki peluang yang sama dengan calon nomor urut satu. Banyak faktor yang menyebabkan keterpilihan calon anggota DPRD di Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 tergantung bagaimana calon bisa memanfaatkan isu, kampanye tawaran program dan penggunaan identitas untuk merebut hati pemilih. Selain itu untuk bisa memenangkan pemilihan juga perlu modal yang tidak sedikit dan perlu modal-modal yang lain untuk bisa menang. Orang yang baru terjun dalam pemilihan anggota DPRD akan sangat sulit untuk bisa memenangkan pemilihan karena juga harus melawan petahana yang telah terlebih dahulu terjun di dunia politik dan menjaga pemilihnya sudah jauh-jauh hari, sementara untuk keperluan modal lain-lain petahana juga unggul, namun dengan pemilihan strategi yang tepat bukan tidak mungkin calon yang tergolong baru terjun ke dunia politik juga bisa mengalahkan petahana.

Selain faktor nomor urut yang biasanya menjadi pengaruh bagi masyarakat untuk memberikan pilihannya kepada anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 faktor kedekatan dan kesamaan tempat tinggal juga bisa menjadi faktor utama dalam proses pemenangan para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019. Kesamaan tempat tinggal atau wilayah domisili digunakan karena menjadi modal awal untuk calon anggota DPRD terpilih di dapilnya dengan memperoleh suara maksimal di desa tempat ia tinggal. Berikut ini peneliti tampilkan tempat tinggal anggota DPRD Kabupaten Pringserwu Tahun 2019 yang terpilih pada pemilihan Tahun 2019:

Tabel 12: Tempat Tinggal Calon Terpilih Dapil 1

| No | Partai Politik | No. Urut DCT | Nama Calon Terpilih          | Kecamatan           |
|----|----------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 1. | PKB            | 2            | Bambang Sugeng Irianto, S.T. | Kecamatan Pringsewu |
| 2. | GERINDRA       | 4            | Sudiyono                     | Kecamatan Pringsewu |
| 3. | PDIP           | 1            | Hj. Retno Palupi             | Kecamatan Pringsewu |
| 4. | GOLKAR         | 1            | Asita Nurgaya, S.E           | Kecamatan Pringsewu |
| 5. | NASDEM         | 1            | Leswanda Putra               | Kecamatan Pringsewu |
| 6. | PKS            | 2            | Homsi Wastobir, S.T.         | Kecamatan Pringsewu |
| 7. | PAN            | 1            | Asa Attorida El Hakim, SE.MM | Kecamatan Pringsewu |
| 8. | DEMOKRAT       | 2            | Ir. Joni Sapuan              | Kecamatan Pringsewu |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Tabel 13: Tempat Tinggal Calon Terpilih Dapil 2.

| No | Partai Politik | No. Urut DCT | Nama Calon Terpilih            | Kecamatan                           |
|----|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | PKB            | 1            | Maulana Muhammad Lahuddin, S.E | Tanjung Karang Barat                |
| 2. | PKB            | 5            | Iin Irawan, S.Pd.I             | Kecamatan Adiluwih                  |
| 3. | GERINDRA       | 1            | Amproni, S.E                   | Kecamatan Sukoharjo                 |
| 4. | PDIP           | 2            | Rizky Raya Saputra, S.H        | Kecamatan Sukoharjo                 |
| 5. | GOLKAR         | 2            | Lusi Ariyanti, S.H             | Kecamatan Sukoharjo                 |
| 6. | GOLKAR         | 1            | Sagang Nainggolan              | Kecamatan Sukoharjo                 |
| 7. | PKS            | 1            | Suryo Atmono                   | Kecamatan Bangunrejo/Lampung Tengah |
| 8. | PAN            | 1            | Mustopa                        | Kecamatan Sukoharjo                 |
| 9. | DEMOKRAT       | 9            | Nurul Ekhwan                   | Kecamatan Adiluwih                  |
|    |                |              |                                |                                     |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Tabel 14: Tempat Tinggal Calon terpilih Dapil 3.

| No | Partai Politik | No. Urut DCT | Nama Calon Terpilih | Kecamatan             |
|----|----------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1. | PKB            | 7            | Muhammad Zuhdi, S.E | Kecamatan Gading Rejo |
| 2. | GERINDRA       | 1            | Rahwoyo, S.E        | Kecamatan Gading Rejo |
| 3. | PDIP           | 1            | Aris Wahyudi, S.T   | Kecamatan Gading Rejo |
| 4. | GOLKAR         | 1            | Anton Subagiyo, S.H | Kecamatan Gading Rejo |
| 5. | PKS            | 2            | M. Triaksono, S.P   | Kecamatan Gading Rejo |
| 6. | PAN            | 1            | Safrudin, S.Hi      | Kecamatan Gading Rejo |
| 7. | DEMOKRAT       | 4            | Mira Anita          | Kecamatan Gading Rejo |
|    |                |              |                     |                       |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Tabel 15: Tempat Tinggal Calon terpilih Dapil 4.

| No | Partai Politik | No. Urut DCT | Nama Calon Terpilih     | Kecamatan           |
|----|----------------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 1. | PKB            | 1            | Hj. Mastuah, A.Md, Kep. | Kecamatan Pardasuka |
| 2. | GERINDRA       | 1            | Najaruddin, S.E         | Kecamatan Ambarawa  |
| 3. | PDIP           | 1            | Suryo Cahyono, S.H      | Kecamatan Ambarawa  |
| 4. | GOLKAR         | 3            | Rita Irviani, S.E, M.M  | Kecamatan Pringsewu |
| 5. | NASDEM         | 1            | Rohmansyah              | Kecamatan Ambarawa  |
| 6. | PPP            | 1            | Hj. Sururiyah           | Kecamatan Pardasuka |
| 7. | PAN            | 7            | Yulian Munajat          | Kecamatan Ambarawa  |
|    |                |              |                         |                     |

Sumber: Data diolah oleh peneliti



Tabel 16: Daftar calon terpilih daerah pemilihan Pringsewu 5.

| No | Partai Politik | No. Urut DCT | Nama Calon Terpilih          | Kecamatan           |
|----|----------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 1. | PKB            | 5            | Hermawan                     | Kecamatan Pagelaran |
| 2. | GERINDRA       | 1            | Umi Laila                    | Kecamatan Pagelaran |
| 3. | PDIP           | 1            | Aminallah Adisyanto F. S.E.  | Kecamatan Pagelaran |
| 4. | GOLKAR         | 1            | Suherman                     | Kecamatan Banyumas  |
| 5. | GOLKAR         | 3            | Rini Anggraini, S.Pd         | Kecamatan Banyumas  |
| 6. | PKS            | 3            | Melfi Anindya Larasati, S.Pd | Kecamatan Pagelaran |
| 7. | PPP            | 2            | Johan Arifin                 | Kecamatan Pagelaran |
| 6. | PAN            | 1            | Hartono Rosadi, S.E          | Kecamatan Pagelaran |
| 7. | DEMOKRAT       | 2            | Ririn Puspitasari            | Kecamatan Pagelaran |
|    |                |              |                              |                     |

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel diatas terdapat 37 anggota DPRD yang berasal dari dapil pemilihanya, dan ada 3 yang berasal dari luar dapil pemilihanya yang berhasil meraih kursi di wilayahnya. Kesamaan tempat tinggal denga pemilih bisa menjadi modal awal yang sangat diperlukan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan memanfaatkan kesamaan tempat tinggal dengan pemilih. Kesamaan perdapil atau wilayah kecamatan nantinya akan ditarik kembali menjadi basis tiap desa sesuai dengan batas kemampuan anggaran dan popularitas yang dimiliki calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu, politisasi identitas yang dilakukan oleh para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 termasuk dalam pendekatan instrumentalisme baik etnis, agama, dan wilayah dilakukannya sebagai alat untuk memanipulasi dan memobilisasi identitas untuk kepentingan calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu.

Politisasi etnis dengan menggunakan simbol dan bahasa Jawa dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 dilakukan sebagai alat untuk memanipulasi dan memobilisasi pemilih mayoritas Jawa dengan strategi kampanye yang digunakan oleh setiap calon dengan berbagai pertimbangan. Anggota DPRD yang berasal dari etnis Jawa yang berhasil dengan menggunakan bahasa Jawa atau simbol Jawa dalam sependuk, baliho, *banner*, kaos dan lain sebagainya. Calon Non-Jawa berhasil juga mendapatkan kursi dengan menggunakan bahasa Jawa, dan ada juga dengan menggunakan bahasa nasional saja juga bisa memenangkan pemilihan.

Politisasi agama yaitu penggunaan agama untuk tujuan politiknya dengan menggunakan sentiment dan isu-isu keagamaan dengan menggunakan peci, hijab, simbol-simbol keagamaan dan penampilan yang lebih agamis namun tidak semua calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu menggunakan simbol keagamaan ada juga yang menggunakan pakaian biasa atau pakaian adat. Politisasi agama dimanfaatkan dengan lebih mendekati diri ke tokoh agama dilingkungan pemilih serta sering bersilaturahmi dengan kelompok-kelompok pengajian serta menjanjikan sesuatu kepada mushola, masjid, gereja dan lain-lain untuk tujuan politiknya. Politisasi agama sendiri juga digunakan untuk melemahkan calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang beragama non muslim baik yang dilakukan oleh calon itu sendiri dan tim sukses serta pemilihnya. Politisasi agama

akan lebih terasa apabila ada calon yang berbeda dengan agama dari calon yang lain atau mayoritas namun calon Non-Islam juga berhasil memenangkan kursi pemilihan dengan menggunakan politisasi agama.

Politisasi wilayah dilakukan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu untuk mempertegas wilayah dan basis suaranya yang bisa dimobilisasi massanya karena berdasarkan domisili wilayah atau kesamaan desa dengan calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Isu wilayah domisili ini digunakan langsung baik oleh calon maupun masyarakat dan tim sukses di desanya untuk melemahkan calon lain masuk kedesaanya untuk mengamankan suara di wilayah atau di desanya. Isu kesamaan wilayah ini juga tidak semua dilakukan oleh calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu namun merupakan modal awal yang harus dijaga suaranya. Bagi petahana yang mendiami suatu wilayah tertentu mungkin akan lebih mudah ketimbang calon yang baru terjun ke dunia politik. Strategi ini ada yang berhasil dan ada juga yang gagal, karena ada calon yang di luar dapil pun berhasil mendapatkan kursi.

Politisasi identitas yang terus dilakukannya oleh setiap calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu merupakan wujud demokrasi yang ada di Indonesia yang masih erat dengan penggunaan sentiment etnis, agama, dan masih barbau unsur SARA. Politisasi identitas dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik antar pendukung yang terus menggunakan politisasi identitas sebagai cara untuk mendapatkan suara, konflik bisa terjadi lantaran tidak terwakilinya wakil mereka di pemerintahan. Sementara penggunaan simbol dan bahasa Jawa yang disebar oleh para calon anggota DPRD Kabupaten Pringsewu juga menimbulkan rasa diskriminasi diantara etnis minoritas. Politisasi identitas merupakan strategi yang telah dipilih oleh oleh tim sukses dan calon itu sendiri untuk kepentingan politiknya namun juga harus tetap menghormati calon lain dan pemilih yang minoritas supaya konflik bisa diminimalisir.

## 6.2 Saran

Hasil penelitian terhadap politisasi identitas pada kampanye pemilihan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun 2019, menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pembenahan kedepannya yaitu sebagai berikut:

### 1) Saran Teoritis

1. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai teori politik identitas dan politisasi identitas dalam setiap pemilu dan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur supaya penggunaan politik identitas dapat diminimalisir di dalam demokrasi baik ditingkat nasional dan di tingkat lokal serta ancaman yang ditimbulkan dengan seringnya elit politik menggunakan sentiment identitas khususnya agama dan etnis yang dapat memobilisasi dan menyentuh emosional masyarakat.

### 2) Saran Praktis

1. Perlu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat supaya masyarakat tidak dengan mudah memilih berdasarkan identitas dari seseorang, melainkan harus terlebih dahulu mendengarkan program kerja dan visi misi dari setiap calon sebelum menentukan pilihan.
2. Perlunya aturan main yang baku yang bisa membedakan mana yang termasuk politisasi identitas dan mana yang bukan termasuk politisasi identitas, sehingga tidak dengan mudah dimainkan oleh elit untuk tujuan politiknya dan membuat diskriminasi minoritas. serta menjauhkan dari unsur SARA.
3. Perlu adanya pendidikan politik dari partai politik untuk memberikan pengarahan kepada setiap kadernya untuk tidak menggunakan sentiment dan isu identitas dalam setiap pemilihan melainkan harus dengan program kerja, serta visi misi yang jelas untuk mempengaruhi pemilih, bukan berdasarkan isu identitas tertentu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, F. (2013). *Identitas Etnis Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012)*.
- Arifin, A. (2014). *Perspektif Ilmu Politik* (Cet Ke-2). Jakarta: Pustaka Indonesia Jakarta.
- Barth, F. (1988). *Kelompok Etnis dan Batasannya Terjemah Oleh Nining,LS*. Jakarta: UI Pers.
- Cangra, H. (2011). *Komunikasi Politik:Konsep, Teori dan Strategi* (Ke-3). Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Damanik, E. L. (2018). *Politik Lokal dan Dinamika Etnisitas pada era Desentralisasi di Sumatera Utara* (Cet Ke-1). Medan: Simetri Institute.
- Edytya, N. P., & Novanda, G. D. (2018). Unsur SARA dalam Kampanye : Sebuah Studi Komparasi Pilkada Sumatera Utara dan DKI Jakarta. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(3), 563–580. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27025>
- Faraidiany, M., Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Politik Identitas dalam Iklan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 113. <https://doi.org/10.24114/jupii.v11i1.12310>
- Firmanzah. (2010). *Marketing politik* (ke-2; Firmanzah PhD, Ed.). Jakarta: obor pustaka.
- Haboddin, M. (2012). *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. UIN Malik Ibrahim, Malang.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (Cet Ke-1; H. Sazali, Ed.). Medan: Wal ashri Publishing.
- Hasan, I. (2000). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Peneitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169–183.
- Hurriyah. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Perihal Penyelenggaraan Pemilu. In D. Srikartini (Ed.), *Bawaslu* (Ke-1). Jakarta: Bawaslu.
- Ma'arif, A. S. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.

- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (ke)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Negong, Y. Y. (2017). Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur NTT 2013 di Kota Kupang. *Jurnal Ilmu Politik Volume 8 Nomor 2, Oktober 2017, 8(2)*, 52–63.
- Paskarina, D. M. & C. (2008). *Demokrasi & Politik Desentralisasi (Ke-1)*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Qodir, A. K. & Z. (2010). Dinamika Etnis Dalam Proses Politik Lokal Daerah. *Dinamika Etnis Dalam Proses Politik Lokal Daerah*.
- Rahmaini, P. (2017). *Sikap Etnis Jawa dan Lampung Terhadap Pluralitas Etnis Calon Pada Pemelihan Kepala Daerah di Kabupaten Pringsewu*. (Vol. 1). Universitas Lampung.
- Ranto, O., & Ip, S. (2017). *Trend Sentimen Pemilih Berbasis Kedaerahan Pada Pilgub 2017 Di Babel*. 1–13.
- Rendy Adiwilaga-M Ridha Tr Mustabsyirotul Ummah Mustofa. (2018). Pemilu Dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Bawaslu, Volume 3 N(January 2017)*, 269–284.
- Riastuti, F. (2009). Simbol-Simbol Etnik dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung (Studi Pada Suksesi Pemilihan Kepala Daerah Lampung Periode 2009-2014). *Skripsi Sosiologi Universitas Lampung*.
- Ruslan, I. (2014). Paradigma Politisasi Agama: Upaya Reposisi Agama Dalam Wilayah Publik. *MADANIA, Vol. XVIII*, 161–174. Retrieved from <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=69216663-0fd3-dc3d-4ff0-8cbf475120fd&documentId=9d2a0a37-4a94-3376-8d1c-c3daf9e6e472>
- Sagala, I. D., & Sarumpaet, B. A. M. (2018). Politik Identitas Etnis Dalam Pilkada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Binjai Tahun 2015. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 4(1), 139. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.10268>
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research and Development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*.
- Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 145–156. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/4164>
- Setyaningrum, A. (2005a). *Mematakan Lokasi Bagi Politik Identitas dalam*

*Wacana Politik Poskolonial dalam "Politik Perlawanan."* Yo: IRE.

Setyaningrum, A. (2005b). *Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas dalam Wacana Politik Poskolonial dalam "Politik Perlawanan."* Yogyakarta: IRE.

Shofan, M. (2018). Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis? *MAARIF Journal*, 13(2), 3–6. Retrieved from <http://www.jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/17>

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Urbaningrum, A. (2004). *Melamar Demokrasi Dinamika Politik Indonesia (Ke-1)*. Jakarta: Penerbit Republika.

Yandra, A. (2010). *Politik Etnisitas Dalam Pemilu Kada*. 1–34.

Zharfandy, I. (2016). *Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013*.

Zuhar, A. (2016). Etnisitas Dalam Politik (Studi Tentang Strategi Calon Legislatif Etnis Batak Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Daerah Pemilihan Siak 4 Kabupaten Siak Tahun 2014). *JOM FISIP*, 3(1), 1–10.

### **Web internet**

<https://beritamanado.com/simon-awuy-jelaskan-9-metode-kampanye-yang-sah/>

### **Dokumen UUD**

Pasal 185 UU Pemilu.

Pasal 172-Pasal 180 UU Pemilu.

Pasal 240-Pasal 257 UU Pemilu.

Pasal 418-420 UU Pemilu.

Pasal 353 Ayat 1 Huruf b UU Pemilu.

Pasal 167 UU Pemilu